YAMAHA
Revs your Heart
SEMAKIN DI DEPAN

SULTENG RAYA

Perekat Rakyat Sulteng

JUMAT, 6 NOVEMBER 2026 | 8 HALAMAN

LANGGANAN: RP.100.000,- | ECERAN: RP.5.000,-

WAR ON DRUGS
For Humanity

TAK MAU TINGGAL KENANGAN

Anwar Hafid Dorong Revitalisasi Persawahan di Trans Mayayap

SULTENG RAYA - Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid meminta perusahaan memulihkan lahan persawahan warga Desa Trans Mayayap, Kecamatan Bualemo, Kabupaten Banggai, yang terdampak aktivitas tambang, Rabu (4/11/2026).

Saat meninjau lokasi, Gubernur mengungkapkan bahwa dari hasil kajian dan dokumen yang dikumpulkan, lebih dari 492 hektare sawah tak lagi produktif sejak aktivitas pertambangan mulai beroperasi tujuh tahun silam.

"Rakyat harus hidup, perusahaan juga boleh hidup. Tetapi perusahaan harus bertanggung jawab atas dampak yang ditimbulkan," tegasnya seraya meminta perusahaan melakukan revitalisasi lahan persawahan dan kompensasi kepada petani yang terdampak.

Gubernur menekankan bahwa sawah tersebut merupakan bagian dari kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) yang harus dilindungi.

Karena itu, pemulihannya bukan sekadar urusan teknis, tetapi juga menyangkut ketahanan pangan dan keberlangsungan hidup petani.

Sebagai tindak lanjut dari peninjauan, ia meminta OPD teknis bersama pemerintah kecamatan, desa, masyarakat, dan perusahaan segera menyepakati langkah teknis dan target waktu pemulihan.

Perusahaan juga diimbau segera menurunkan alat berat untuk memperbaiki lahan yang terdampak.

Gubernur menegaskan bahwa investasi jangan sampai mengorbankan hak masyarakat. Karena itu, pemulihan sawah adalah prioritas yang harus dituntaskan agar petani Trans Mayayap dapat bekerja kembali.

Sebagai bentuk keseriusan, Gubernur Anwar berjanji akan kembali ke lokasi dan menjadi yang pertama menanam padi jika sawah sudah dipulihkan.

"Kalau sawah ini sudah aktif kembali, saya sendiri yang akan datang menanam pertama," pungkasnya.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut Ketu TP-PKK Ir. Sry Nirwanti Bahasoan, Asisten II Kab. Banggai, perwakilan PT. Integra Mining Nusantara, para kepala perangkat OPD lingkup pemerintah provinsi Sulawesi Tengah, serta para pemangku lainnya. WAN



GUBERNUR Sulteng, Anwar Hafid saat meninjau lahan persawahan warga Desa Trans Mayayap, Kecamatan Bualemo, Kabupaten Banggai yang terdampak aktivitas tambang, Rabu (4/11/2026). **FOTO: BIRO ADPIM**

UKW PWI di Parigi, 26 Wartawan Dinyatakan Kompeten



DIREKTUR UKW PWI Pusat, Dr. Aat Surya Syafaat, saat memeriksa jawaban seorang peserta UKW Kelas Utama, Rabu (4/11/2026). **FOTO: AMILUDDIN**

SULTENG RAYA - Sebanyak 26 wartawan dinyatakan kompeten, setelah mengikuti Uji Kompetensi Wartawan (UKW) yang diselenggarakan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Parigi Moutong (Parmout), Sulawesi Tengah.

Dari jumlah tersebut, tiga wartawan dinyatakan kompeten pada jenjang Utama, 12 jenjang Madya, dan 11 jenjang Muda.

Baca UKW Hal. 7

Terduga Pelaku Curanmor di Parigi Akhirnya Ditangkap



TERDUGA pelaku curanmor berinisial FA berhasil ditangkap oleh URC Polres Parigi Moutong Satreskrim di Jalan Kerajalemba, Kelurahan Kalukubula, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, Rabu (4/11/2026). **FOTO: IST**

SULTENG RAYA – Pelarian seorang pria berinisial FA (36 tahun), yang diduga terlibat dalam kasus pencurian kendaraan bermotor (curanmor) di Kelurahan Kampal, Kabupaten Parigi Moutong, akhirnya terhenti. Tim Resmob Unit Reaksi Cepat (URC) Satreskrim Polres Parigi Moutong berhasil mengamankan pria tersebut di wilayah Kabupaten Sigi, Rabu (4/11/2026).

Baca TERDUGA Hal. 7

60 Persen Pekerja IMIP Gen Z, Ruang bagi Angkatan Produktif

SULTENG RAYA – Kehadiran industri pengolahan dalam program hilirisasi mineral membuka peluang kerja besar, sekaligus mengembangkan keterampilan dan membangun karier. Di kawasan PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), besarnya keterlibatan generasi muda menjadi gambaran nyata peran perusahaan dalam menyediakan ruang bagi angkatan kerja produktif.

Sebagai penggerak utama penyerapan tenaga kerja yang secara signifikan menekan angka pengangguran terbuka di Morowali, Sulawesi Tengah, dan wilayah Indonesia Timur, IMIP terus memberi kesempatan sama bagi semua pekerja. Data ketenagakerjaan di kawasan IMIP mencatat, ada 61.169

Baca IMIP Hal. 7



PEKERJA Gen Z di IMIP. **FOTO: IST**

Api Melahap 50 Hektare Perkebunan di Olonggata

SULTENG RAYA – Kebakaran Kobaran api melahap kawasan perkebunan warga di Dusun II, Desa Olonggata, Kecamatan Moutong, Kabupaten Parigi Moutong, Rabu (4/11/2026). Sekitar 50 hektare lahan perkebunan hangus terbakar, sementara sedikitnya 25 pemilik kebun terdampak dalam peristiwa tersebut.

Kebakaran yang terjadi sekitar pukul 11.30 Wita itu melanda perkebunan yang ditanami pohon cengkeh,

Baca API Hal. 7



KEBAKARAN lahan terjadi di Desa Olonggata, Kecamatan Moutong, Kabupaten Parigi Moutong, Rabu (4/11/2026). **FOTO: IST**

POLRES POSO

Segera Periksa Penanggung Jawab Aktivitas PETI



TANGKAPAN LAYAR- Kerumunan orang di lokasi PETI Desa Dongi-Dongi, Kecamatan Lore Utara, Kabupaten Poso pada peristiwa longsor yang menimpa sejumlah orang, Senin (2/11/2026) malam. **FOTO: ANTARA/DOKUMENTASI PRIBADI**

SULTENG RAYA - Kepolisian Resor (Polres) Poso, segera memeriksa pihak yang bertanggung jawab atas aktivitas penambangan emas tanpa izin (PETI) di Dongi-Dongi, Kabupaten Poso, setelah peristiwa longsor yang menewaskan dua orang di kawasan tersebut pada Senin (2/11) malam.

"Jadi untuk saat ini sudah dilakukan pendalaman, secepatnya besok ini sudah bisa kita

Baca POLRES Hal. 7



POLSEK Palu Selatan, saat mengimbau warga Kelurahan Birobuli Utara, agar waspada El Nino dan cegah pembakaran hutan, Kamis (5/11/2026). FOTO: DOK. POLSEK PALU SELATAN

Warga Birobuli Utara Diimbau Waspada El Nino dan Cegah Pembakaran Hutan

SULTENG RAYA – Dalam rangka Operasi Aman Tinombala 2026, Kapolsek Palu Selatan AKP Muhammad Kasim, S.H., bersama anggota Patroli Polsek Palu Selatan melaksanakan imbauan kepada warga Kelurahan Birobuli Utara, tepatnya di Jalan Angkasa, Kelurahan Birobuli Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kamis (5/11/2026).

Kegiatan tersebut dilaksanakan, guna memberikan pemahaman kepada masyarakat akan bahaya dan risiko akibat fenomena El Nino yang saat ini melanda, yang dapat memicu terjadinya kebakaran hutan dan lahan.

Dalam imbauannya, Kasim, mengajak seluruh warga untuk berperan aktif dalam mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan, dengan tidak membakar sampah sembarangan, tidak membuka lahan dengan cara membakar, serta segera melaporkan kepada pihak kepolisian atau pemerintah setempat apabila menemukan titik api.

"Kami berharap masyarakat dapat ikut berperan aktif. El Nino ini membuat cuaca sangat panas dan kering, sedikit saja api bisa menjadi besar. Mari kita jaga lingkungan kita bersama-sama agar tidak terjadi karhutla," ujar Kapolsek.

Melalui kegiatan ini, diharapkan kesadaran masyarakat semakin meningkat, sehingga wilayah Kecamatan Palu Selatan, khususnya Kelurahan Birobuli Utara, dapat terhindar dari bencana kebakaran hutan dan lahan.

Selama kegiatan berlangsung, situasi terpantau aman, tertib, dan kondusif. Polsek Palu Selatan akan terus melaksanakan patroli dan himbauan secara rutin selama Operasi Aman Tinombala 2026 berlangsung. AMR

PERKUAT SOLIDITAS TNI-POLRI

Kapolda Sulteng Tatap Muka Dengan Pangdam Palaka Wira

SULTENG RAYA – Memperkuat koordinasi dalam menjaga keamanan wilayah menjadi salah satu fokus Kapolda Sulawesi Tengah Irjen Pol Rizal Irawan. Hal itu diwujudkan melalui kunjungan silaturahmi ke Markas Komando Daerah Militer (Makodam) XXIII/Palaka Wira, Kamis (5/11/2026).

Kedatangan rombongan Polda Sulteng disambut langsung Pangdam XXIII/Palaka Wira, Mayjen TNI Jonathan Binsar Parluhutan Sianipar bersama jajaran. Pertemuan berlangsung dalam suasana akrab sebagai upaya mempererat hubungan kedua institusi.

Kabid Humas Polda Sulteng Kombes Pol Achmad Muhaimin mengatakan, kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergitas dan soliditas TNI-Polri dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat di Sulawesi Tengah.

Menurutnya, salah satu pembahasan dalam pertemuan itu adalah peningkatan koordinasi dan kerja sama antara TNI dan Polri, khususnya dalam pelaksanaan tugas menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat.

"Bapak Kapolda dan Pangdam menegaskan komitmen bersama untuk menjaga stabilitas keamanan, persatuan, dan perdamaian di wilayah Sulawesi Tengah agar tetap aman dan kondusif," ucapnya.

Selain itu, Kapolda turut memperkenalkan konsep Program Polisi Bersama Masyarakat yang mengedepankan pendekatan humanis dan kolaboratif. Program ini bertujuan memperkuat kedekatan Polri dengan masyarakat melalui pelayanan yang lebih optimal.

"Melalui silaturahmi ini, kami berharap sinergitas TNI-Polri semakin kuat dalam menjaga keamanan dan menciptakan situasi kamtibmas yang aman serta kondusif di Sulawesi Tengah," tutupnya.

Dalam kunjungan tersebut, Kapolda didampingi Wakapolda Brigjen Pol Semmy Ronny Thabaa, Karo SDM Kombes Pol Anton Sudjarwo, Karo Log Kombes Pol Stefanus Michael Tamuntuan, Dirreskrimum Kombes Pol Suryono, serta Dirreskrimsus AKBP Putu Hendra Binangkari. AMR



KAPOLDA Sulteng Irjen Pol Rizal Irawan berdialog dengan Pangdam XXIII/PW, Mayjen TNI Jonathan Binsar Parluhutan Sianipar, saat kunjungan silaturahmi guna memperkuat soliditas TNI-Polri, di Makodam XXIII/PW, Kamis (5/11/2026). FOTO: HUMAS POLDA SULTENG



KAPOLRES Sigi, AKBP Agus Dwi Cahyono, saat menyosialisasikan larangan penggunaan vape di lingkungan Polri, Selasa (3/11/2026). FOTO: HUMAS POLRES SIGI

Kapolres Sigi Sosialisasi Larang Penggunaan Vape di Lingkungan Mapolres

SULTENG RAYA – Kapolres Sigi AKBP Agus Dwi Cahyono, menyosialisasikan imbauan larangan penggunaan rokok elektrik atau vape di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sosialisasi tersebut disampaikan saat kegiatan konferensi pers di Aula Sarja Arya Racana Polres Sigi, Selasa (3/11/2026).

Imbauan ini merupakan tindak lanjut Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/1/X/2026 tentang Larangan Penggunaan Rokok Elektrik (Vape) di Lingkungan Polri. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya membangun lingkungan kerja yang sehat, tertib, disiplin, serta menjunjung tinggi profesionalisme dan etika institusi.

Kapolres menegaskan bahwa larangan tersebut berlaku bagi seluruh personel Polri dan ASN Polri, termasuk tamu maupun pengunjung di lingkungan kerja kepolisian, baik di dalam maupun di luar ruangan kerja. Selain berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan, penggunaan vape juga menjadi perhatian karena berpotensi disalahgunakan sebagai media peredaran zat terlarang serta dapat mengganggu kenyamanan dan ketertiban lingkungan kerja.

Melalui sosialisasi ini, Kapolres Sigi mengajak seluruh personel untuk memahami dan mematuhi ketentuan tersebut. Bagi personel yang melanggar akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku, sementara tamu atau pengunjung yang kedapatan menggunakan vape akan diberikan teguran dan diminta mematikan serta menyimpan perangkatnya.

Langkah ini bukan sekadar penegakan aturan, tetapi juga wujud komitmen membangun keteladanan dari dalam institusi. Dengan lingkungan kerja yang sehat, disiplin, dan profesional, Polri diharapkan semakin optimal dalam memberikan pelayanan serta menjaga kepercayaan masyarakat. AMR

GM PLN UID Suluttenggo Tinjau Kesiapan SPKLU Inobonto di Trans Sulawesi

SULTENG RAYA- General Manager PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Sulawesi Utara, Tengah, dan Gorontalo (UID Suluttenggo), Wahyu Prasetyo melakukan peninjauan langsung terhadap kesiapan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) di ULP Inobonto, wilayah kerja PLN UP3 Kotamobagu, pada Minggu (1/11). Kegiatan ini dilaksanakan untuk memastikan keandalan infrastruktur pengisian daya sekaligus meningkatkan kualitas layanan bagi masyarakat pengguna kendaraan listrik (Electric Vehicle).

Turut mendampingi dalam kegiatan tersebut jajaran manajemen PLN UID Suluttenggo dan UP3 Kotamobagu, antara lain Manager PLN UP3 Kotamobagu, Senior Manager Perencanaan UID Suluttenggo, Manager Komunikasi dan TJSL, Assistant Manager Jaringan dan Konstruksi Distribusi UP3 Kotamobagu, serta Manager ULP Inobonto. Kehadiran jajaran manajemen ini mencerminkan komitmen dan perhatian serius PLN terhadap penguatan ekosistem kendaraan listrik di daerah.

Dalam kunjungannya, Wahyu Prasetyo menegaskan bahwa penyediaan infrastruktur pengisian daya yang andal merupakan fondasi penting dalam mendukung transisi energi bersih di Indonesia.

"Melalui pengecekan ini, kami ingin memastikan bahwa seluruh fasilitas SPKLU di lapangan berada dalam kondisi prima, siap beroperasi 24 jam, serta memberikan kenyamanan penuh bagi para pengguna kendaraan listrik yang melintas maupun beraktivitas di wilayah Inobonto dan sekitarnya," ungkap Wahyu.

Ia juga menambahkan, PLN terus berinovasi dan memperluas cakupan infrastruktur kelistrikan hijau guna mengakselerasi target Net Zero Emission (NZE) pemerintah. "Kedepan, PLN akan terus memetakan titik-titik strategis lainnya agar konektivitas mobilitas berbasis listrik semakin mulus dan merata di seluruh wilayah Sulawesi Utara, Tengah, dan Gorontalo," tambahnya.



SPKLU Inobonto di Jalur Trans Sulawesi. FOTO: DOK. PLN

Sementara itu, di wilayah kerja PLN UP3 Kotamobagu sendiri saat ini telah tersedia 15 unit SPKLU yang tersebar di 6 lokasi layanan, yakni Kantor UP3 Kotamobagu, ULP Imandi, ULP Inobonto, ULP Modayag, ULP Bolmut, dan ULP Molibagu. Dari total tersebut, 10 unit diperuntukkan bagi kendaraan roda empat (mobil) dan 5 unit untuk kendaraan roda dua (motor). Khusus di ULP Inobonto, tersedia tiga unit fasilitas pengisian, yang terdiri dari satu unit SPKLU R2 EVC untuk motor di kantor ULP Inobonto serta dua unit SPKLU untuk mobil.

Manager PLN UP3 Kotamobagu, Ade Arrang Malle Mantiri, menyambut baik peninjauan langsung yang dilakukan oleh jajaran manajemen UID Suluttenggo. Menurutnya, langkah ini menjadi motivasi bagi tim di lapangan untuk terus menjaga performa layanan.

"Kami sangat mengapresiasi arahan dan tinjauan langsung dari Bapak GM beserta jajaran manajemen UID Suluttenggo. PLN UP3 Kotamobagu berkomitmen untuk terus menjaga kesiapan operasional fasilitas ini,"ungkap Ade.

Pengembangan ekosistem kendaraan listrik ini turut menjadi bagian dari perayaan Hari Listrik Nasional (HLN) ke-81 yang mengusung tema "Energi untuk Semua, Kemandirian bagi Indonesia". Momentum ini menjadi pengingat bahwa peran PLN tidak hanya menjaga keandalan pasokan listrik rumah tangga, tetapi juga menghadirkan inovasi infrastruktur masa depan yang berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat.*/HJ

PASTIKAN KEANDALAN PASOKAN LISTRIK

GM PLN UID Suluttenggo Tinjau PLTMG, Dispatcher dan PLTD Luwuk



GENERAL Manager (GM) PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Sulawesi Utara, Tengah, dan Gorontalo (UID Suluttenggo), Wahyu Prasetyo, melaksanakan kunjungan kerja ke sejumlah fasilitas kelistrikan strategis di wilayah Luwuk. **FOTO: PLN**

SULTENG RAYA - Guna memastikan keandalan pasokan listrik dan kesiapan infrastruktur kelistrikan, General Manager (GM) PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Sulawesi Utara, Tengah, dan Gorontalo (UID Suluttenggo), Wahyu Prasetyo, melaksanakan kunjungan kerja ke sejumlah fasilitas kelistrikan strategis di wilayah Luwuk. Peninjauan tersebut meliputi Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) Luwuk, Dispatcher sistem kelistrikan, serta Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) Luwuk.

Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan kesiapan sistem pembangkitan dan operasional distribusi kelistrikan berjalan optimal dalam menjaga kontinuitas pasokan listrik serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Dalam peninjauan langsung tersebut, jajaran manajemen PLN UID Suluttenggo menginspeksi kondisi operasional, kesiapan kompartemen dan peralatan teknis, hingga ketahanan sistem kelistrikan di wilayah kerja PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Luwuk.

General Manager PLN UID Suluttenggo, Wahyu Prasetyo, menegaskan pentingnya pemeliharaan preventif dan kesiapsiagaan personil di lapangan dalam mengawal pasokan listrik yang andal dan aman bagi masyarakat.

“Kunjungan lapangan ini merupakan komitmen PLN untuk memastikan seluruh sistem kelistrikan mulai dari keandalan mesin pembangkit hingga penguncian kendali distribusi di Dispatcher berada dalam kondisi prima. Kami ingin memastikan pasokan listrik di Luwuk dan sekitarnya tetap andal dan stabil, sehingga seluruh aktivitas ekonomi serta kegiatan masyarakat dapat terlayani dengan optimal,” ungkap Wahyu.

Ia juga menambahkan bahwa PLN terus memperkuat disiplin eksekusi operasional dan budaya Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di setiap unit pembangkitan maupun pengatur beban. "Keandalan sistem tidak hanya bergantung pada keunggulan teknologi, tetapi juga pada kesiapsiagaan personil yang bertugas 24 jam menjaga pasokan listrik tetap kontinu dan aman," tambah Wahyu.

Pada peninjauan pertama di PLTMG Luwuk, pemeriksaan difokuskan pada kesiapan operasional mesin gas, ketersediaan pasokan bahan bakar, serta performa kit pembangkit dalam merespons dinamika beban listrik. Selanjutnya, kunjungan dilanjutkan ke ruang Dispatcher untuk melihat secara langsung proses pemantauan real-time dan pengaturan distribusi beban kelistrikan. Peninjauan diakhiri di PLTD Luwuk guna memastikan kesiapan pembangkit cadangan (back-up supply) berfungsi optimal jika sewaktu-waktu dibutuhkan. Manager PLN UP3 Luwuk, Ridwan Bogie Rismawan, menyampaikan bahwa arahan dan peninjauan langsung dari General Manager PLN UID Suluttenggo menjadi motivasi bagi seluruh tim di unit pelayanan untuk menjaga standar operasional terbaik.

“Kehadiran Bapak General Manager memberikan arahan strategis sekaligus penyemangat bagi kami di UP3 Luwuk. Seluruh jajaran di PLN UP3 Luwuk berkomitmen penuh mengawal keandalan pasokan listrik, memperkuat pengawasan operasional, serta menghadirkan pelayanan terbaik dan responsif kepada pelanggan,” ungkap Ridwan.

Melalui kegiatan peninjauan infrastruktur ini, PLN UID Suluttenggo bersama PLN UP3 Luwuk terus membuktikan komitmennya dalam menghadirkan energi listrik yang andal, aman, dan berkualitas demi mendukung pertumbuhan ekonomi serta aktivitas masyarakat di Sulawesi Tengah dan sekitarnya.*/HJ

SEMARAK HARI BAKTI KEMENIMIPAS

Anak Binaan LPKA Palu Rekreasi di Millennium Waterpark



PEGAWAI LPKA Kelas II Palu berpose bersama anak binaan saat rekreasi bersama di Millennium Waterpark Palu, Kamis (5/11/2026).

SULTENG RAYA – Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Palu memenuhi hak rekreasional anak binaan melalui rekreasi bersama di Millennium Waterpark Palu, Kamis (5/11/2026).

Kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka menyambut Hari Bakti Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) Republik Indonesia.

"Momentum menyambut Hari Bakti Kemenimipas ini kami jadikan pijakan untuk terus mengedepankan pendekatan yang humanis. Pemenuhan hak atas rekreasi dan hiburan ini sangat krusial bagi kesehatan mental serta tumbuh kembang anak binaan kita," kata Kepala LPKA Palu, Welli.

Ia menuturkan pada kegiatan rekreasi luar kantor ini, pihaknya mengikutsertakan 15 orang anak binaan untuk menikmati fasilitas arena bermain air bersama seluruh jajaran pejabat struktural dan staf pegawai LPKA Palu.

Pihaknya memastikan bahwa meski tengah menjalani masa pembinaan, hak dasar anak-anak untuk merasa bahagia,bersosialisasi, dan mendapatkan ruang berekspresi tetap terpenuhi secara optimal, serta berada di bawah pengawalan dan pengawasan ketat dari para petugas guna memastikan situasi tetap aman dan kondusif.

Welli juga menyampaikan apresiasi mendalam atas sinergi dan kolaborasi erat antara LPKA Palu dengan pihak pemerhati anak dari sektor swasta, yakni pengelola Millennium Waterpark Palu.

Menurutnya,keterlibatan pihak luar sangat membantu menciptakan lingkungan pembinaan yang inklusif serta mendukung pemulihan psikologis anak.

Sementara itu, pemilik (owner) Millennium Waterpark Palu, Candra Wijaya (Ko Awi), mengapresiasi dan menyambut hangat kedatangan rombongan LPKA Palu di tempat usahanya.

"Anak-anak ini adalah generasi penerus bangsa yang membutuhkan perhatian, dukungan, dan kesempatan yang sama.Kami berharap melalui kegiatan ini, masyarakat luas juga terpanggil untuk memberikan pandangan positif serta ruang penerimaan bagi masa depan mereka," tutur Ko Awi.

Kebahagiaan mendalam turut dirasakan oleh salah satu anak binaan berinisial CW. Rasa syukur dan gembira terpancar saat ia dapat menikmati fasilitas rekreasi air bersama teman-teman dan para petugas.

"Saya dan teman-teman sangat senang sekali bisa diajak berenang dan bermain di Millennium Waterpark hari ini.Kegiatan ini membuat pikiran kami segar dan menambah semangat kami untuk terus memperbaiki diri," ucap CW dengan senyum gembira.

Melalui kegiatan pemenuhan Hak Anak, mari bersama kita berikan kepedulian, ruang penerimaan, dan dukungan positif bagi anak-anak binaan LPKA Palu untuk melangkah menuju masa depan yang lebih cerah.*/YAT

OPS PATUH TINOMBALA 2026

Hadirkan Layanan SIM KOMUNITAS Jemput Bola Hingga Pelosok Desa

SULTENG RAYA – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) melalui Korps Lalu Lintas (Korlantas) menghadirkan Program Pelayanan SIM KOMUNITAS dan Masyarakat dalam rangka Operasi Patuh 2026.

Program ini bertujuan mendekatkan pelayanan penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM) kepada masyarakat agar lebih mudah dijangkau, cepat, dan optimal.

Hal tersebut disampaikan Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Sulawesi Tengah, Kombes Pol Agung Tri Widiantoro, kepada seluruh jajaran Ditlantas Polda Sulteng, Selasa (3/11/2026) usai mengikuti analisa dan evaluasi bersama Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Brigjen Pol Dr. Aries Syahbudin, di Mako Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Sulteng.

Dirlantas mengatakan, Operasi Patuh 2026 bukan semata-mata kegiatan penegakan hukum di jalan raya, tetapi juga menjadi momentum untuk meningkatkan kualitas pelayanan fungsi lalu lintas kepada masyarakat.

Menurutnya, pelayanan penerbitan SIM harus semakin dekat dan mudah diakses, khususnya bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan akses terhadap layanan kepolisian.

Karena itu, ia menginstruksikan jajarannya untuk melaksanakan pelayanan SIM KOMUNITAS di lokasi-lokasi dengan kebutuhan masyarakat yang cukup tinggi, seperti di kampus, sekolah, perkantoran, kawasan industri atau pabrik, hingga pelosok desa, dengan tetap menyesuaikan karakteristik wilayah masing-masing.



Agung Tri Widiantoro

Dirlantas juga menegaskan agar seluruh personel memberikan pelayanan secara profesional, transparan, dan akuntabel.

Ia secara khusus mengingatkan agar tidak ada pungutan biaya tambahan dalam bentuk apa pun di luar tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) resmi penerbitan SIM.

"Pelaksanaan program ini harus benar-benar berorientasi pada kemudahan dan pelayanan kepada masyarakat. Pastikan masyarakat mendapatkan pelayanan yang maksimal," tegasnya.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Sulteng, Kombes Pol Achmad Muhaimin mengatakan pelayanan SIM KOMUNITAS yang semakin dekat dengan masyarakat merupakan wujud nyata komitmen Polri dalam memberikan pelayanan publik yang mudah, transparan, dan berkualitas.

Ia mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan layanan tersebut serta mengikuti seluruh prosedur penerbitan SIM sesuai ketentuan yang berlaku, tanpa melalui perantara maupun memberikan biaya di luar tarif resmi.

"Kami berharap program ini dapat memperluas akses pelayanan SIM KOMUNITAS, meningkatkan kesadaran tertib berlalu lintas, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Operasi Patuh harus memberikan manfaat nyata, tidak hanya melalui penegakan hukum, tetapi juga melalui pelayanan yang humanis dan semakin dekat dengan masyarakat," harapnya.*/YAT



Tiwi/Fadia Juara Hylo Open 2026

SULTENG RAYA - Ganda putri Indonesia, Amallia Cahaya Pratiwi/Siti Fadia Silva Ramadhanti, mengukir prestasi membanggakan dengan menjuarai Hylo Open 2026. Mereka mengalahkan unggulan pertama asal Taiwan, Hsu Yin-hui/Lin Jhih-yun, 21-18, 21-19, pada partai final di Saarlandhalle, Saarbrucken, Jerman, Minggu (1/11/2026).

Keberhasilan tersebut ternyata memiliki makna lebih dari sekadar tambahan gelar. Terutama buat Fadia, momen ini menghapus kenangan pahit yang pernah dialaminya di turnamen yang sama tiga tahun lalu.

Ya, saat masih berpasangan dengan Apriyani Rahayu, Fadia juga pernah mencapai final Hylo Open 2023. Namun, kala itu harapannya untuk menjadi juara terpaksa kandas setelah Apriyani mengalami cedera di gim kedua.

Kejadian tersebut begitu membekas sehingga Fadia sempat merasa sedikit down jelang menghadapi Hsu/Lin. "Tahun 2023 saya mencapai babak final Hylo Open bersama Apriyani Rahayu. Sempat ada trauma karena di game pertama sudah menang, namun di game kedua kak Apriyani saat itu cedera," kata Fadia.

"Sebelum pertandingan (lawan Hsu/Lin) agak kebayang-bayang juga, dan sedihnya ada juga. Tapi saya berusaha fokus lagi pas udah di lapangan, lebih tenang dan lebih atur nafasnya lagi," tambahnya.

Untungnya, kali ini Fadia mampu melewati situasi tersebut dengan hasil berbeda. Bersama Tiwi, dia berhasil menjaga fokus dan ketenangan hingga pertandingan berakhir. Mereka beberapa kali tertinggal dari pasangan Taiwan, tapi secara luar biasa sanggup membalikkan keadaan untuk membawa pulang gelar. "Alhamdulillah sangat senang dan bahagia karena kami bisa mengambil gelar di Super 500 kali ini," ujarnya.

"Secara permainan sebenarnya tidak ada yang berubah dari lawan, kami menerapkan strategi yang sama di game pertama dan game kedua. Namun, di game kedua kami terlalu banyak melakukan kesalahan sendiri dan lawan jadi lebih berani buat menyerang kami," dia melanjutkan.

Sementara, Tiwi mengaku sangat bersyukur bisa meningkatkan pencapaian bersama Fadia.

Setelah menjuarai BWF World Tour Super 300 di Thailand Masters 2026, Februari lalu, sekarang mereka naik level dengan merengkuh titel Hylo Open 2026 yang berstatus Super 500.

Tiwi mengakui pertandingan final berlangsung ketat sejak awal hingga memasuki poin-poin krusial. Namun, arahan pelatih Karel Mainaky menjadi salah satu faktor penting yang membantu mereka melewati tekanan.

"Permainan tadi cukup ketat, dari awal sampai game poin, tapi kami mencoba untuk tetap tenang, fokus, dan tidak terburu-buru," ujar Tiwi. "Coach Karel banyak mengingatkan untuk lebih berani, saling menutup satu sama lain, nekat, dan memaksa karena ini match terakhir," lanjutnya. RPB

BNPB Catat 2.295 Bencana Sepanjang 2026

SULTENG RAYA – Indonesia mengalami 2.295 kejadian bencana sepanjang 1 Januari hingga 4 November 2026. Bencana tersebut menyebabkan 427 orang meninggal dunia, 21 orang hilang, dan lebih dari 6 juta orang terdampak.



FOTO: IST

Anggota DPR RI Komisi VIII Fraksi PDI Perjuangan Ina Ammania meminta pemerintah daerah dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) meningkatkan upaya mitigasi serta kesiapsiagaan masyarakat. Menurut dia, langkah pencegahan dan persiapan harus dilakukan sebelum bencana terjadi, bukan hanya saat penanganan darurat.

"Keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas. Jangan menunggu korban berjatuhan untuk memperkuat mitigasi. Lebih baik bersiap sebelum bencana daripada menyesal setelah semuanya terjadi," kata Ina melalui keterangannya, Rabu (4/11/2026).

Ina mengatakan, masyarakat yang tinggal di wilayah rawan bencana perlu mendapatkan edukasi kebencanaan secara berkelanjutan. Edukasi tersebut mencakup penyiapan jalur evakuasi yang aman, sistem peringatan dini, serta pendampingan dari pemerintah.

Dia juga mengingatkan masyarakat untuk mengenali ancaman di lingkungan masing-masing, termasuk banjir, cuaca ekstrem, dan kekeringan. Perubahan kondisi lingkungan perlu diperhatikan sebagai langkah antisipasi.

Perlindungan kelompok rentan, seperti anak-anak, lanjut usia, penyandang disabilitas, ibu hamil, dan warga yang membutuhkan bantuan untuk menyelamatkan diri, juga perlu masuk dalam perencanaan evakuasi. Ina menilai kelompok tersebut harus mendapat perhatian agar tidak terabaikan saat keadaan darurat.

Menurut Ina, kesiapsiagaan bencana bukan hanya tanggung jawab BPBD dan pemerintah, melainkan membutuhkan keterlibatan masyarakat hingga tingkat desa dan keluarga. Pemerintah daerah juga perlu mendampingi warga sejak tahap pencegahan, persiapan, pemulihan, hingga pembangunan kembali kehidupan setelah bencana.

"Kenali ancaman di desa kita, siapkan jalur evakuasi dan peringatan dini, serta pastikan titik rawan ditindaklanjuti," kata Ina.

Berdasarkan data BNPB per 4 November 2026, bencana hidrometeorologi mendominasi kejadian bencana dengan porsi 99,21 persen. Sementara itu, bencana geologi tercatat sebesar 0,79 persen. Bencana hidrometeorologi meliputi banjir, kebakaran hutan dan lahan (karhutla), cuaca ekstrem, kekeringan, tanah longsor, serta gelombang pasang dan abrasi.

Karhutla menjadi bencana dengan jumlah kejadian terbanyak, yakni 1.063 kejadian. Banjir menyusul dengan 611 kejadian dan cuaca ekstrem sebanyak 351 kejadian. Adapun kekeringan tercatat 125 kejadian dan tanah longsor 113 kejadian.

Untuk bencana geologi, BNPB mencatat 14 kejadian gempa bumi dan empat kejadian erupsi gunung api. Secara keseluruhan, bencana sepanjang tahun ini juga menyebabkan 3.260 orang luka-luka dan 6.005.617 orang menderita serta mengungsi.

Dari sisi kerusakan, sebanyak 32.405 rumah mengalami rusak berat, 38.263 rumah rusak sedang, dan 86.987 rumah rusak ringan. Bencana juga merusak 2.391 satuan pendidikan, 926 rumah ibadat, 245 fasilitas pelayanan kesehatan, 773 kantor, serta 118 jembatan.RPB

Gubernur Texas Anti-Islam Tumbang di Pemilu Sela AS

SULTENG RAYA - Gubernur Texas dari Partai Republik, Greg Abbott yang telah menjabat selama tiga periode akhirnya kalah lewat pemilu sela. Politikus yang terkenal anti-Islam dan pendukung Israel garis keras itu dikalahkan anggota DPR negara bagian dari Partai Demokrat, Gina Hinojosa.

Hasil yang mengejutkan ini mengakhiri dominasi Partai Republik selama tiga dekade atas jabatan gubernur, menurut proyeksi media AS pada Selasa. Merujuk Reuters, Hinojosa mencatatkan sejarah sebagai orang Hispanik pertama yang terpilih untuk memimpin negara bagian tersebut.

Sejak tahun 1994, belum ada kandidat dari Partai Demokrat yang memenangkan jabatan di tingkat negara bagian di Texas; ini merupakan periode kekosongan kemenangan terlama di seluruh Amerika Serikat.

Hasil ini menjadi kejutan lain di tengah malam yang gemilang bagi Partai Demokrat, yang diproyeksikan akan menguasai baik DPR maupun Senat, berkat kemenangan di sejumlah negara bagian konservatif seperti South Carolina dan Kansas.

Gregg Abbot sebelumnya kerap menjadi sorotan kelompok pembela kebebasan beragama dan organisasi hak-hak sipil Muslim di Amerika Serikat. Sejumlah kebijakan dan tindakannya terhadap komunitas Muslim, lembaga Islam, serta isu Palestina-Israel menuai kritik karena dinilai memperkuat sentimen anti-Islam.

Sedangkan strategi Hinojosa sebagian bergantung pada upaya meyakinkan para pemilih Latin bahwa kenaikan biaya hidup dan masalah di sekolah negeri—yang kondisinya kian tertekan—jauh lebih penting daripada isu-isu "perang budaya" yang dalam beberapa tahun terakhir telah menarik banyak pemilih Latin untuk beralih ke Partai Republik.

"Kami sama-sama orang Texas dan orang Amerika seperti siapa pun," ujarnya dalam sebuah wawancara dengan Reuters di Austin pada bulan Juli. "Masyarakat Latin merasakan tekanan ekonomi, sama seperti keluarga-keluarga di seluruh negeri ini, termasuk di Texas, yang terdampak cukup parah."

Abbott menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk menggalang dukungan di Texas Selatan; ia secara rutin mengunjungi komunitas-komunitas di wilayah perbatasan yang mayoritas penduduknya adalah warga Latin, membangun jaringan operasional lapangan yang luas di Rio Grande Valley, serta menjadikan isu keamanan perbatasan sebagai fokus utama dalam upaya menjangkau para pemilih.

Hinojosa muncul sebagai pesaing yang tak terduga bagi salah satu gubernur dari Partai Republik yang paling dikenal dan memiliki pendanaan terbaik di negara tersebut.

Kemenangannya terjadi bersamaan dengan kemenangan anggota DPR negara bagian, James Talarico, dalam pemilihan Senat AS di Texas, menurut proyeksi media. Ia mengalahkan kandidat Partai Republik, Ken Paxton, yang didukung oleh Presiden Donald Trump.

Menurut Direktur Eksekutif Voto Latino, Beatriz Lopez, kemenangan Partai Demokrat ini merupakan hasil dari tingginya partisipasi pemilih Latin, yang termotivasi oleh kekhawatiran mengenai keterjangkauan biaya hidup serta agenda penegakan imigrasi yang agresif dari Trump.

Organisasi tersebut, yang berupaya mendaftarkan dan memobilisasi pemilih Latin, telah mendaftarkan sekitar 400.000 pemilih di Texas pada siklus pemilihan ini dan berharap dapat mempertahankan momentum tersebut hingga pemilihan presiden tahun 2028.

"Ini adalah kemenangan menyeluruh di Texas," ujarnya. "Hal ini benar-benar menempatkan Texas sebagai negara bagian medan pertempuran politik—dan itu mengubah segalanya, baik saat ini maupun menuju tahun 2028."

JEJAK ANTI-ISLAM GREG ABBOTT

Pada 2025, Abbott menetapkan Council on American-Islamic Relations (CAIR), organisasi advokasi hak-hak sipil Muslim terbesar di AS, bersama Ikhwanul Muslimin sebagai organisasi teroris asing dan organisasi kriminal transnasional.

Keputusan tersebut melarang kedua organisasi dan pihak-pihak yang dikaitkan dengan mereka memperoleh atau membeli properti di Texas. Abbott menuduh CAIR memiliki agenda memaksakan penerapan syariah dan membangun dominasi Islam di dunia.

Dua hari setelah menetapkan CAIR dan Ikhwanul Muslimin sebagai organisasi teroris, Abbott memerintahkan Departemen Keamanan Publik Texas (DPS) melakukan penyelidikan kriminal terhadap kedua organisasi tersebut.

Abbott menuduh kedua-nya mendukung terorisme internasional melalui kekerasan, intimidasi, dan pelecehan. Dia juga menyebut CAIR sebagai organisasi yang menjadi kedok Hamas dan anak perusahaan langsung Ikhwanul Muslimin.

Abbott juga menjadikan rencana pembangunan komunitas Muslim EPIC City di kawasan Plano, Texas, sebagai sasaran kritik dan penyelidikan pemerintah. Dia menuduh proyek yang dikembangkan East Plano Islamic Center (EPIC) berpotensi menciptakan kawasan eksklusif Muslim, memberlakukan hukum syariah, dan membatasi hak kepemilikan properti. Abbott juga mengancam menarik bantuan pendanaan negara bagian dan federal untuk Bandara Internasional Dallas-Fort Worth (DFW) dan George Bush Intercontinental Airport di Houston karena keberadaan fasilitas wudhu bagi penumpang Muslim.

Abbott berulang kali menggunakan isu penerapan syariah untuk mengkritik komunitas Muslim di Texas. Pada 2026, isu anti-syariah bahkan semakin menguat dalam politik Partai Republik Texas. Sejumlah tokoh partai mendorong pembatasan terhadap simbol keagamaan Islam, sekolah Islam, hingga aktivitas warga yang mendukung penerapan syariah.

Di sisi lain, Gregg Abbott dikenal sebagai salah satu gubernur Partai Republik yang secara terbuka mendukung Israel. Dukungan tersebut tidak sebatas pernyataan politik, tetapi juga diwujudkan melalui kebijakan ekonomi, pendidikan, dan hubungan diplomatik.

Abbott menandatangani House Bill 89 yang melarang lembaga pemerintah Texas berkontrak dengan perusahaan yang memboikot Israel. Kebijakan ini juga membatasi investasi dana publik pada perusahaan yang terlibat gerakan Boycott, Divestment and Sanctions (BDS). Abbott bahkan menyatakan, "Anti-Israel policies are anti-Texas policies."

Abbott mengunjungi Israel dan bertemu Netanyahu pada November 2023 saat Israel memulai genosida di Jalur Gaza dengan dalih membalas serangan Hamas pada 7 Oktober 2023. Dia bertemu Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan sejumlah pejabat Israel serta menyatakan dukungan Texas terhadap Israel.

Pada Oktober 2023, Abbott juga melarang pembelian produk dari Jalur Gaza. Abbott menerbitkan Executive Order GA-43 yang memerintahkan seluruh lembaga pemerintah Texas tidak membeli barang yang diproduksi atau diekspor dari Jalur Gaza maupun organisasi yang memiliki hubungan dengan Hamas.

Pada 2024, Abbott menerbitkan Executive Order GA-44 yang memerintahkan perguruan tinggi negeri Texas memperketat kebijakan kebebasan berbicara untuk menangani antisemitisme. Kebijakan ini menuai kritik kelompok kebebasan sipil karena definisi antisemitisme yang digunakan dikhawatirkan dapat membatasi kritik terhadap Israel dan ekspresi dukungan kepada Palestina.

Abbott juga memperingatkan pemerintah Kota San Marcos agar tidak mengesahkan resolusi yang menyerukan embargo terhadap Israel dan pengalihan dana publik yang mengalir kepada militer Israel. Dia mengancam menghentikan hibah pemerintah negara bagian kepada kota tersebut jika resolusi disahkan.

Ia juga menetapkan 7 Oktober sebagai hari peringatan Israel. Abbott menetapkan peringatan khusus untuk mengenang serangan Hamas terhadap Israel. Dia menginstruksikan pengibaran bendera setengah tiang dan mengajak masyarakat mengheningkan cipta.RPB



Greg Abbott









Menangkal Provokasi dan Disinformasi demi Menjaga Kedamaian Papua

MENJAGA keamanan Papua membutuhkan strategi yang tidak hanya berfokus pada penanganan gangguan ketika terjadi, tetapi juga pada kemampuan mencegah konflik sejak dini. Pencegahan merupakan langkah strategis untuk melindungi masyarakat, menjaga keberlangsungan pendidikan, dan memastikan generasi muda dapat tumbuh dalam lingkungan yang aman.

OLEH : ALBERT WEYA*

DALAM konteks ini, upaya pemerintah memperkuat stabilitas keamanan perlu didukung melalui pendekatan yang menggabungkan kesiapsiagaan aparat, deteksi dini, pendidikan, serta keterlibatan aktif masyarakat.

Papua memiliki potensi generasi muda yang besar untuk menjadi penggerak pembangunan daerah dan kemajuan Indonesia. Agar potensi tersebut berkembang secara optimal, lingkungan yang aman menjadi kebutuhan mendasar. Gangguan keamanan dapat menghambat aktivitas sosial, membatasi mobilitas warga, dan mengganggu pelayanan publik. Karena itu, mencegah konflik bukan hanya menjadi kepentingan aparat keamanan, melainkan juga bagian dari upaya melindungi masa depan anak-anak dan generasi muda Papua.

Langkah pemerintah memperkuat koordinasi keamanan di Papua Tengah dan Papua Barat Daya pada akhir Oktober 2026 memperlihatkan pentingnya kesiapsiagaan dan kerja sama lintas sektor. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurachman menekankan profesionalisme aparat, keselamatan personel, serta pendekatan humanis dalam pelaksanaan tugas. Arahan tersebut relevan bagi strategi pencegahan konflik karena keamanan yang efektif memerlukan tindakan terukur, pemahaman terhadap kondisi masyarakat, dan kemampuan merespons potensi gangguan secara tepat.

Pencegahan konflik perlu dimulai dengan penguatan komunikasi di tingkat lokal. Tokoh adat, tokoh agama, kepala kampung, pendidik, pemuda, dan perempuan memiliki peran penting dalam mengenali perubahan situasi sosial serta menyampaikan aspirasi masyarakat. Mereka dapat menjadi penghubung antara warga, pemerintah daerah, dan aparat keamanan ketika muncul persoalan yang berpotensi berkembang menjadi konflik. Pelibatan unsur lokal juga membantu memastikan langkah pencegahan menghormati adat istiadat dan karakteristik masyarakat setempat.

Di sisi lain, deteksi dini perlu dijalankan secara profesional dan bertanggung jawab. Informasi mengenai potensi gangguan keamanan harus diverifikasi sebelum ditindaklanjuti agar tidak menimbulkan kesalahpahaman atau merugikan warga yang tidak terlibat. Koordinasi antara TNI, Polri, pemerintah daerah, dan unsur terkait diperlukan untuk memastikan setiap perkembangan ditangani berdasarkan fakta, sesuai hukum, dan mengutamakan keselamatan masyarakat. Dengan mekanisme yang tepat, potensi konflik dapat ditangani sebelum menimbulkan dampak yang lebih luas.

Kapolda Papua Barat Daya Brigadir Jenderal Hengki Haryadi menekankan pentingnya kolaborasi lintas lembaga dalam menjaga stabilitas wilayah. Prinsip tersebut dapat diperluas dalam bentuk kerja sama pencegahan yang melibatkan layanan pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan pemerintahan kampung. Persoalan sosial yang belum tertangani dapat menjadi sumber ketegangan apabila dibiarkan berlarut-larut. Karena itu, koordinasi keamanan perlu disertai kemampuan pemerintah menyelesaikan persoalan masyarakat secara cepat, adil, dan terbuka.

Perlindungan generasi muda juga harus menjadi bagian dari agenda keamanan jangka panjang. Sekolah yang aman, kegiatan kepemudaan, pelatihan keterampilan, dan kesempatan kerja dapat memperluas pilihan masa depan anak muda Papua. Pemerintah daerah bersama lembaga pendidikan, keluarga, dan organisasi masyarakat perlu membangun ruang yang mendorong kreativitas, kepemimpinan, serta partisipasi positif generasi muda. Investasi pada pendidikan dan pemberdayaan bukan pengganti tugas pengamanan, melainkan pelengkap penting dalam membangun ketahanan sosial masyarakat.

Selain itu, literasi digital semakin diperlukan untuk mencegah penyebaran informasi yang dapat memperkeruh keadaan. Informasi yang tidak terverifikasi, gambar tanpa konteks, atau kabar yang sengaja dipelintir dapat menimbulkan keresahan dan memicu ketegangan antarkelompok. Masyarakat perlu membiasakan diri memeriksa sumber informasi dan tidak langsung menyebarkan kabar yang belum terbukti. Pemerintah dan aparat juga perlu menyampaikan informasi secara jelas, tepat waktu, dan dapat dipertanggungjawabkan agar publik memperoleh penjelasan yang memadai.

Upaya pencegahan konflik harus tetap berlandaskan perlindungan hak masyarakat. Setiap warga berhak memperoleh rasa aman, menyampaikan aspirasi secara damai, dan mendapatkan pelayanan publik tanpa diskriminasi. Apabila terjadi dugaan pelanggaran hukum, penanganannya harus mengikuti prosedur yang berlaku dan dilakukan secara transparan. Prinsip ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat sekaligus memastikan bahwa langkah pencegahan tidak menimbulkan persoalan baru.

Keberhasilan pencegahan juga perlu diukur melalui indikator yang nyata, seperti berkurangnya gangguan keamanan, terjaganya akses pendidikan dan kesehatan, meningkatnya koordinasi antarlembaga, serta pulihnya aktivitas masyarakat di wilayah terdampak. Evaluasi berkala dapat membantu pemerintah mengidentifikasi kebijakan yang efektif dan memperbaiki langkah yang belum memberikan hasil optimal. Dengan demikian, strategi keamanan tidak berhenti pada kegiatan operasional, tetapi berkembang menjadi sistem perlindungan masyarakat yang terencana dan berkelanjutan.

Masa depan keamanan Papua sangat ditentukan oleh kemampuan semua pihak membangun pencegahan yang kuat. Aparat membutuhkan dukungan masyarakat, sedangkan masyarakat membutuhkan perlindungan, pelayanan, dan kepastian hukum dari negara. Melalui deteksi dini yang bertanggung jawab, komunikasi yang terbuka, pendidikan yang berkualitas, dan pemberdayaan generasi muda, pemerintah dapat memperkuat fondasi keamanan dari tingkat komunitas. Papua yang aman bukan hanya wilayah tanpa gangguan, melainkan wilayah tempat anak-anak dapat bersekolah, keluarga menjalankan aktivitas, dan generasi muda merancang masa depan dengan penuh harapan. **Penulis merupakan Pemerhati pembangunan dan sosial kemasyarakatan Papua*

Revisi UU Pemilu dan Upaya Penguatan Bawaslu

LANGKAH Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI yang secara resmi membentuk Panitia Kerja (Panja) Revisi Undang-Undang Pemilihan Umum (UU Pemilu) pada 29 September 2026 lalu, menjadi angin segar bagi iklim ketatanegaraan kita. Di bawah komando Bahtra Bahong sebagai ketua, pembentukan Panja ini memantik kembali asa publik akan hadirnya instrumen regulasi Pemilu yang memenuhi asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil (Luber Jurdil).

OLEH : MOHAMMAD FEIR CHALIFARDY NA'A, S.H., M.H.

DI tengah riuh rendah isu-isu elitis tersebut, ada satu celah fundamental yang kerap terpinggirkan dari sorotan utama, yaitu arah desain penguatan kelembagaan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Penguatan kelembagaan Bawaslu sudah saatnya berhenti dijadikan sekadar wacana normatif yang miskin pengejawantahan serius dalam naskah undang-undang. Meletakkan Bawaslu pada posisi yang lebih kokoh, baik dari segi kewenangan atributif maupun daya eksekutorialnya, adalah sebuah wacana yang patut diseriusi oleh Pemebentuk Undang-Undang. Ini bukan semata soal menebalkan postur sebuah institusi, melainkan ikhtiar krusial dan garda terakhir untuk menjaga muruah serta kualitas substansial demokrasi di Indonesia.

HAK AKSES DATA SEBAGAI BAGIAN DARI PENGAWASAN SUBSTANTIF

Penulis memandang bahwa tanpa adanya jaminan akses data yang presisi dan real time, jalannya pengawasan di lapangan hanya akan menjadi "macan ompong yang sibuk meraba raba di ruang gelap." Preseden buruk ketiadaan akses ini juga memicu karut marut pada tahapan Verifikasi Administrasi dan Faktual Bakal Calon Peserta Pemilu dan Pemilihan, baik untuk anggota DPR, DPD, maupun Bakal Pasangan Cakada dari jalur perseorangan.

Merespons sengkarut tata kelola ini, pembentuk undang-undang pada agenda revisi kelak dituntut memiliki kejernihan paradigma. Harus ada kesadaran utuh bahwa secara kedudukan Bawaslu dan KPU berada pada garis yang sejajar, di mana relasi institusional di antara keduanya didesain berkarakter horizontal. Penulis menegaskan kembali bahwa secara eksplisit, Pasal 1 angka 7 UU No. 7/2017telah menyatakan bahwa KPU, Bawaslu, dan DKPP adalah satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu. Konstruksi hukum ini sebelumnya juga telah dipancangkan kuat melalui Putusan MK Nomor 11/PUU VIII/2010, yang belakangan menjadi dasar pertimbangan dan perumusan pasal tersebut.

MENGGAGAS UJI PETIK DARI SEKEDAR METODE MENJADI TAHAPAN

Pengawasan Pemiluy yang substantif tidak hanya sibuk mencentang daftar kelengkapan administrasi, tetapi berani melangkah lebih tajam untuk memastikan ada atau tidaknya ketepatan dan kesesuaian di balik dokumen yang tampak rapi. Apabila ada bagian krusial yang patut direvisi dari regulasi pemilu kita, maka salah satu terobosan utamanya adalah memuat agenda uji petik (spot checks) secara eksplisit ke dalam sejumlah tahapan pemilu yang krusial.

Ketiadaan uji petik secara formal dalam tahapan Pemilu inilah yang membuat upaya pengawasan di lapangan menjadi tidak optimal. Praktik uji petik, seperti yang dilakukan pasca tahapan Pencocokan dan Penelitian (Coklit), kerap terpaksa dieksekusi secara terburu-buru karena jadwalnya saling berkejaran dengan tahapan Pemilu lain yang sudah menanti di depan mata. Alhasil, Bawaslu acapkali kehabisan napas dan tidak memiliki kecukupan waktu untuk benar benar menguji tingkat kebenaran serta kesesuaian proses Coklit.

Penulis berpandangan bahwa Pembentuk Undang-Undang perlu melakukan reformulasi tahapan pemilu dengan presisi yang lebih matang. Harus didesain sebuah jeda tahapan (cooling period) yang diletakkan secara khusus sesudah tahapan Coklit dan verifikasi faktual berakhir. Ketersediaan ruang jeda ini sangat esensial untuk memberikan waktu yang proporsional bagi Bawaslu guna menguji kualitas penyelenggaraan teknis yang dilakukan oleh KPU melalui instrumen sampling secara acak.

JUMLAH SDM PENGAWAS AD HOC

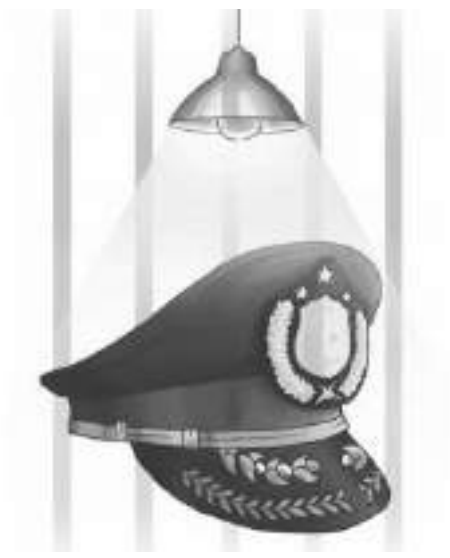
Dalam spektrum kerja Bawaslu beserta barisan Pengawas Ad Hoc di bawahnya, salah satu masalah paling krusial yang selalu berulang adalah intensitas pelanggaran pada tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara. Dalam merespons masalah tata kelola pengawasan pada puncak tahapan Pemilu tersebut, Penulis menawarkan serangkaian opsi bagi para Pembentuk Undang-Undang dalam agenda revisi UU Pemilu. Pertama, mempertahankan skema satu pengawas tunggal per TPS, namun dibarengi dengan dukungan operasional yang memadai. Kedua, mendesain mekanisme pengawas tambahan yang basis argumennya bersandar pada indikator risiko (risk-based approach). Ketiga, membangun model pengawasan berlapis (layered supervision).

Dari ketiga opsi yang tergelar, Penulis secara rasional memandang bahwa opsi pertama dan kedua merupakan gagasan logis dan menjanjikan daya hantam yang presisi terhadap akar masalah di lapangan. Artinya, Pembentuk Undang-Undang tidak perlu merumuskan bahwa setiap TPS wajib memiliki dua atau lebih pengawas tanpa mempertimbangkan kebutuhan. Sebaliknya, Pembentuk Undang-Undang perlu menetapkan norma yang memuat standar minimum kapasitas pengawasan dan indikator objektif untuk menentukan kebutuhan personel tambahan.

SARAN PERBAIKAN

Dalam menjalankan mandat konstitusionalnya sebagai lembaga pengawas elektoral, Bawaslu tentu tidak didesain sekadar menjadi pengamat yang pasif. Bawaslu bertugas menyediakan langkah dan sarana yang terukur untuk memastikan seluruh proses tahapan pemilu berjalan pada rel yang semestinya (on track). Sebagai manifestasi dari peran tersebut, Bawaslu menerbitkan Saran Perbaikan, Secara normatif, Pasal 18 ayat (3) Perbawaslu No. 5/2022 telah mengatur bahwa institusi yang menerima Saran Perbaikan wajib melaksanakannya dalam rentang waktu paling lama tiga hari sejak dokumen tersebut disampaikan, atau menyesuaikan dengan tenggat waktu yang secara khusus ditentukan oleh jajaran Pengawas Pemilu. *Penulis: Akademisi Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Tadulako*

TAJUK



Ujian Pertama Kapolri Baru

SOROTAN tajam masyarakat kini tertuju pada Polri setelah institusi itu dikabarkan menetapkan tiga petingginya sebagai tersangka kasus dugaan penyadapan ilegal. Bukan sembarang penyadapan, yang diduga menjadi sasaran ialah Presiden Prabowo Subianto.Baca Isu Politik

Lebih mengejutkan lagi, mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo menjadi salah satu tersangka bersama dua perwira tinggi lainnya. Geleng-geleng kepala kita dibuatnya. Orang nomor satu di negeri ini diduga disadap komunikasinya bukan oleh intelijen asing, melainkan oleh sesama anak bangsa, bahkan orang yang pernah menjadi kepercayaan Presiden.

Apa yang sesungguhnya terjadi di Republik ini? Bagaimana mungkin orang yang seharusnya menjaga keamanan Presiden justru disangka mencuri informasi dari orang yang dijaganya?

Jika kelak terbukti di pengadilan, peristiwa itu akan menjadi catatan kelam sejarah bangsa. Apalagi, berdasarkan keterangan pers Polri, mereka diduga menyadap komunikasi Presiden tanpa prosedur sah sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010.

Persoalannya, apa yang mereka cari? Sekadar percakapan pribadi Presiden atau justru rahasia negara? Pertanyaan itu mesti dijawab melalui penyidikan menyeluruh. Jika rekaman mengandung rahasia negara, penyidik harus menelusuri tujuan pengumpulan informasi tersebut, termasuk kemungkinan tindak pidana lain.

Termasuk, dugaan potensi adanya makar. KUHP sudah mengatur unsur khusus mengenai makar terhadap presiden, NKRI, maupun pemerintah. Penyadapan ilegal bukan tidak mungkin memenuhi unsur makar tersebut.

Kasus ini jelas menjadi ujian pertama bagi Kapolri Suyudi Ario Seto yang baru dilantik pada 1 Oktober 2026. Baru sebulan menjabat, ia sudah berhadapan dengan perkara yang menyeret mantan Kapolri dan perwira tinggi aktif.

Di sinilah keberanian, ketegasan, sekaligus profesionalisme Polri dipertaruhkan. Penegakan hukum tidak boleh mengenal pangkat, jabatan, ataupun kedekatan dengan kekuasaan.

Kita mendukung pengusutan perkara ini secara tegas, transparan, dan tanpa pandang bulu. Polri wajib mengumpulkan alat bukti, mengungkap motif, serta menelusuri kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat.

Jangan sampai penyidikan kehilangan arah akibat intervensi, solidaritas korps yang keliru, ataupun intrik politik. Publik mesti ikut mengawal agar proses hukum berjalan jernih dan objektif.

Asas praduga tak bersalah tetap harus dijunjung. Jika bukti mencukupi, bawalah perkara ke pengadilan. Jika tidak, jangan memaksakan tuduhan.

Kapolri baru harus membuktikan bahwa reformasi Polri bukan sekadar slogan. Keberanian membersihkan institusi sendiri merupakan ukuran nyata integritas kepemimpinan. Sebab, jika terhadap presiden saja prosedur hukum diduga berani dilanggar, bagaimana nasib rakyat biasa?

Negara hukum tidak boleh membiarkan kekuasaan menjadi tameng pelanggaran. Justru semakin tinggi jabatan seseorang, semakin besar tanggung jawabnya untuk tunduk kepada hukum. Itulah pesan yang harus ditegakkan Kapolri baru tanpa kompromi dan tanpa pengecualian apa pun.*- *Media Indonesia*

TRIMEDIA GROUP
PENERBIT:
PT. Trimedia Sulteng Mandiri
No. Rek. Bank Sulteng, An. **PT. Trimedia Sulteng Mandiri**
Acc. 0010107770011, Rek.BSI No. 7282773443 a.n. PT. Trimedia Sulteng Mandiri
Rek. Bank Mandiri, No. 151-00-1205223-6
An. PT. TRIMEDIA SULTENG MANDIRI
PERWAKILAN JAKARTA: Jl. Tebet Timur IV F No. 6 Jakarta Selatan
(Ahmad Averus Toana, Sudarsono, Syafii, Agung Ramadhan)
PERCETAKAN: **TRIMEDIA GROUP**
(Isi di luar tanggung jawab percetakan)

WARTAWAN **HARIAN SULTENG RAYA**, DIBEKALI KARTU **PERS**/SURAT TUGAS DAN NAMANYA TERCANTUM DALAM **BOX REDAKSI**

PENDIRI/PIMPINAN UMUM: Tri Putra Toana. **DEWAN MANAJEMEN TRIMEDIA :** Tri Putra Toana, Temu Sutrisno, Mahmud Matangara.
PIMPINAN PERUSAHAAN: Suyanto. **PEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNG JAWAB:** Irwan.
REDAKTUR: Amiluddin, Andi Nurhidayat, Rahmat Kurniawan. **STAF REDAKSI:** Irwan, Andi Nurhidayat, Amiluddin, Amar Sakti, Andi Besse Rahmat Kurniawan, Helmy Jatmika. **SEKRETARIS REDAKSI:** Jane Lestari Parabak
LITBANG: A. Madukelleng, Fery, Hangga Nugracha. **BIRO DONGGALA:** Wahid Agus. **BIRO SIGI:** Feri Fadli. **BIRO PARMOUT:** Aslan Laeho. **BIRO TOUNA:** Budi.
BIRO POSO: Syamsuyadi. **BIRO BALUT:** - **BIRO MOROWALI:** Intan. **BIRO MOROWALI UTARA:** Ivan Tagora. **BIRO TOLITOLI:** Rustam.
BIRO BANGKEP: Pariaman Tambunan (Kepala Biro). **BIRO BANGGAI:** Pariaman T.
DESIGN & ARTISTIK: Azwar Anas (Manajer), Feryanto, Wiwis. **PEMASARAN/SIRKULASI:** Narwanro, Zainuddin L, Eko Margianto. **KEUANGAN:** Febrianti.
EMAIL: sultengraya7th@gmail.com, sultengraya@gmail.com **TARIF IKLAN:** Warna (FC) Rp. 45.000/mmk. Hitam Putih (BW) Rp.30.000/mmk.
ALAMAT REDAKSI: Jl. Rusa No. 36 **TLP:** 0451 4012 445 **ALAMAT PERCETAKAN:** Jl. Rusa No.36 Palu.

BULOG Sulteng Evaluasi Penyaluran SPHP dan Minyakita



SUASANA Rapat Koordinasi dan Evaluasi Penyaluran Beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) serta Minyakita Tahun 2026, bertempat di Ruang Rapat Kantor Wilayah Perum BULOG Sulawesi Tengah, Rabu (4/11). FOTO: DOK. BULOG SULTENG

SULTENG RAYA – Perum BULOG Kanwil Sulawesi Tengah menggelar Rapat Koordinasi dan Evaluasi Penyaluran Beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) serta Minyakita Tahun 2026, bertempat di Ruang Rapat Kantor BULOG Sulteng, Jalan Mohammad Yamin, Kota Palu, Rabu (4/11/2026).

Kegiatan yang dipimpin langsung oleh Pemimpin Wilayah (Pimwil) Perum BULOG Kanwil Sulteng ini, dihadiri oleh perwakilan Kejaksaan Tinggi Sulteng, Kodam XXIII/Palaka Wira, Polda Sulteng, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulteng, Dinas Pangan Provinsi Sulteng, serta perwakilan pemerintah kabupaten/kota, termasuk Kota Palu, Kabupaten Donggala, Kabupaten Sigi, dan Kabupaten Parigi Moutong.

Rapat dilaksanakan sebagai bentuk evaluasi terhadap realisasi penyaluran beras SPHP dan Minyakita sekaligus memperkuat koordinasi lintas instansi dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan di wilayah Sulawesi Tengah.

Dalam paparannya, BULOG menyampaikan bahwa hingga 2 November 2026, realisasi penyaluran beras SPHP di Sulteng telah mencapai 10.049 ton atau sekitar 84,5 persen dari target penyaluran sebesar 11.895 ton. Dengan demikian, masih terdapat sisa target sekitar 1.846 ton yang diupayakan dapat diselesaikan sesuai batas waktu penyaluran yang ditetapkan hingga 20 November 2026.

Sementara itu, dalam penyaluran Minyakita, BULOG menekankan pentingnya kepatuhan para pengecer terhadap ketentuan yang berlaku, khususnya penjualan sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) sebesar Rp15.700 per liter. Pengecer juga diwajibkan memenuhi persyaratan administrasi, menjual langsung kepada konsumen akhir, tidak melakukan pengemasan ulang, serta memasang informasi HET di tempat usaha. Dalam sesi diskusi, sejumlah pemerintah daerah menyampaikan berbagai masukan terkait pemerataan distribusi, penambahan pengecer resmi, keterbatasan pasokan Minyakita, serta perlunya pemasangan spanduk informasi harga dan nomor pengaduan di pasar. Pemerintah daerah juga mendorong agar pengawasan dilakukan secara bersama untuk memastikan komoditas SPHP dan Minyakita dapat diterima masyarakat dengan harga sesuai ketentuan.

Melalui rapat tersebut, disepakati penguatan koordinasi antara BULOG dan pemerintah daerah melalui grup komunikasi pengecer di masing-masing wilayah, pembukaan rekomendasi penambahan pengecer resmi dari pemerintah daerah, serta peningkatan pemantauan langsung di lapangan. Setiap temuan pelanggaran diharapkan segera dilaporkan dengan melampirkan bukti pendukung untuk ditindaklanjuti bersama aparat penegak hukum.

"Keterlibatan Kejaksaan, TNI, dan Polri juga menjadi bagian penting dalam memperkuat pengawasan serta mencegah praktik penyalahgunaan distribusi, pengemasan ulang, dan penjualan komoditas pangan di atas HET," kata Pimwil Bulog Sulteng, Jusri Pakke.

Melalui koordinasi dan evaluasi ini, Perum BULOG Sulteng berharap sinergi seluruh pihak dapat semakin ditingkatkan sehingga penyaluran beras SPHP dan Minyakita berjalan lebih efektif, merata, dan tepat sasaran dalam rangka menjaga stabilitas harga pangan serta membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. RHT

Pajak MBLB Lutim Dinilai Melanggar Aturan, Pengamat Sebut Ada Unsur Pemerasan

SULTENG RAYA – Langkah Pemerintah di sejumlah daerah yang gencar mengejar pemasukan tanpa memperhatikan keberlangsungan dunia usaha dan aturan perpajakan, menjadi sorotan pengamat kebijakan publik.

Di Luwu Timur, misalnya. Polemik muncul di kalangan internal DPRD ketika pemerintah daerah menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Pajak (SKPD-KBP) kepada salah satu perusahaan, yakni PT Vale Indonesia.

Padahal, objek pajak yang dikenai pajak tersebut adalah penggunaan tanah overburden atau tanah pucuk yang kaya unsur hara, untuk kegiatan penghijauan atau rehabilitasi lahan. Bukan untuk dijual atau kegiatan komersil.

Anehnya, pemerintah memasukkan kegiatan tersebut sebagai aktivitas tambang yang dikenai Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB).

"Ketika pemerintah menagih pajak dari aktivitas yang bukan termasuk objek pajak, ini justru mengganggu kegiatan usaha dan investasi pertambangan. Justru mengarah ke pemerasan," ungkap akademisi dan pengamat pemerintahan UIN, Dr Ibnu Hadjar.

Menurut dia, kebijakan fiskal yang disahkan oleh Bupati Irwan Bachri Syam bersama anggota DPRD afiliasinya tersebut justru bisa menunjukkan pengelolaan keuangan pemerintah yang tidak akuntabel.

Pemkab Luwu bersama DPRD sebelumnya menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 9 Tahun 2023 yang isinya menetapkan tanah penutup (overburden) aktivitas tambang sebagai objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB).

"Menurut Undang-undang yang berlaku, overburden yang tidak diperjualbelikan, bukan merupakan objek pajak MBLB. Apalagi jika dimanfaatkan untuk melakukan reklamasi lahan, atau penghijauan yang ujungnya mengembalikan ekosistem hutan," ungkap dia.

Ibnu Hadjar memahami, daerah memang gencar mencari pemasukan akibat fiskal daerah yang semakin tipis karena berkurangnya transfer dana dari pusat.

Namun, jika memaksakan memungut dari yang bukan haknya, dan tidak mengacu pada undang-undang, justru bisa menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan.

Kabupaten Luwu Timur sebelumnya memasukkan target pendapatan pajak dari PT Vale sebesar Rp167 miliar ke dalam APBD Perubahan 2026 dari MBLB tersebut.

Persoalan ini mengemuka setelah sejumlah anggota legislatif menyatakan bahwa belum dibayarnya pajak tersebut berpotensi mengganggu program Kartu Lansia dan beasiswa mahasiswa.

"Ketika pendapatan yang dasarnya belum clear dipaksakan masuk ke batang tubuh anggaran dan belanja daerah telanjur diketok, dampaknya adalah kepanikan fiskal saat realisasinya nihil," tambahnya.

Informasi yang dihimpun menunjukkan bahwa ketidakselarasan regulasi ini sebenarnya sudah disadari di internal parlemen Luwu Timur.

Sejumlah anggota dewan maupun staf ahli DPRD Luwu Timur dari kalangan akademisi dilaporkan sepakat bahwa materi muatan perda tersebut bermasalah dan tidak sejalan dengan UU Minerba maupun UU HKPD. Namun, masukan normatif tersebut diduga diabaikan demi meloloskan postur anggaran perubahan.

Saat ini, desakan mulai menguat agar Bupati Irwan Bachri Syam bersama DPRD Luwu Timur segera melakukan revisi total terhadap Perda Nomor 9 Tahun 2023. Langkah normatif ini dinilai lebih mendesak untuk menyelamatkan postur keuangan daerah dari ancaman gagal bayar ketimbang terus memperpanjang polemik di media. *



VALE Indonesia menerima penghargaan pada rangkaian Mineral & Batubara Convention-Expo (Minerba Convex) 2026, di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Selasa (3/11/2026). FOTO: DOK. PT VALE

BRI Bekali Atlet Literasi Keuangan

SULTENG RAYA - Prestasi di podium menjadi puncak dari perjalanan panjang seorang atlet. Namun, setelah medali diraih dan apresiasi diberikan, perjalanan tersebut belum berakhir. Masih terdapat masa depan yang perlu dipersiapkan, termasuk bagaimana mengelola bonus dan pendapatan secara bijak agar dapat memberikan manfaat dalam jangka panjang.

Semangat tersebut menjadi bagian dari program "Financial Champions: Beyond the Podium", yang digelar PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI bersama Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Kemenpora RI) bagi para atlet peraih medali Asian Games ke-20 dan Asian Para Games ke-5.

Kegiatan yang berlangsung di Grand Ballroom Discovery Ancol, Jakarta, Kamis (29/10/2026), menjadi ruang edukasi bagi para atlet untuk membangun pemahaman dan kesiapan dalam mengelola keuangan setelah meraih prestasi.

Melalui diskusi dan pembekalan literasi keuangan, para atlet mendapatkan pemahaman mengenai pengelolaan bonus dan pendapatan secara bijak, investasi yang aman, perencanaan masa pensiun, serta solusi menabung, transaksi, dan proteksi.

Dalam kegiatan tersebut, BRI menggelar diskusi panel literasi keuangan dengan menghadirkan Financial Planner Adrian Maulana serta Wealth Management Specialist BRI sebagai narasumber. Pembahasan diarahkan pada berbagai aspek yang relevan dengan kondisi para atlet, mulai dari pengelolaan bonus prestasi dan pendapatan hingga perencanaan masa depan.

Sebelum sesi literasi dimulai, BRI melakukan pembagian buku tabungan dan kartu ATM kepada para penerima bonus. Langkah tersebut melengkapi proses penyaluran bonus melalui rekening BRI sekaligus memastikan penerima memperoleh akses terhadap layanan perbankan yang dibutuhkan.

BRI sendiri ditunjuk oleh Kemenpora untuk menyalurkan bonus bagi peraih medali Asian Games ke-20 dan Asian Para Games ke-5 melalui rekening BRI. Per 28 Oktober 2026, sebanyak 219 rekening penerima telah difasilitasi dengan estimasi bonus mencapai Rp158 miliar.

Jumlah tersebut terdiri atas 117 rekening penerima bonus Asian Games 2026 dengan estimasi nominal sekitar Rp61 miliar, serta 102 rekening penerima bonus Asian Para Games 2026 dengan estimasi sekitar Rp97 miliar. Pada Asian Games, penerima terdiri atas 87 atlet dan 30 pelatih, sedangkan Asian Para Games mencakup 65 atlet dan 37 pelatih.

Corporate Secretary BRI Dhanny mengungkapkan pemberian penghargaan kepada atlet perlu diikuti dengan kemampuan mengelola keuangan agar dapat memberikan manfaat bagi kehidupan atlet dan keluarganya.

"Bonus yang diterima merupakan bentuk apresiasi atas prestasi mereka, dan tentu akan lebih bermakna apabila dapat dikelola secara bijak untuk kebutuhan hari ini sekaligus menjadi bekal bagi masa depan. Karena itu, melalui program ini BRI ingin berbagi pengetahuan dan perspektif agar para atlet semakin bijak dalam mengambil keputusan keuangan," ujar Dhanny.

Dhanny menambahkan, literasi keuangan menjadi semakin penting bagi atlet karena perjalanan karier di dunia olahraga memiliki karakteristik yang berbeda dengan profesi lainnya. Masa produktif seorang atlet relatif terbatas sehingga perencanaan keuangan perlu dilakukan sejak dini, termasuk dalam menentukan prioritas penggunaan pendapatan, membangun dana untuk masa depan, serta memahami pilihan investasi dan proteksi yang sesuai.

"Kami berharap edukasi ini dapat membantu para atlet memahami bahwa pengelolaan keuangan bukan hanya soal menyimpan uang, tetapi bagaimana merencanakan, melindungi, dan mengembangkan aset secara bertanggung jawab. Dengan begitu, hasil dari perjuangan mereka di arena dapat terus memberikan manfaat dalam jangka panjang," tambah Dhanny.

Program ini juga menjadi bagian dari upaya BRI dalam menghadirkan layanan keuangan yang memberikan nilai tambah bagi masyarakat. BRI memandang literasi keuangan sebagai salah satu fondasi penting untuk membangun kemandirian dan ketahanan finansial, termasuk bagi para atlet yang telah memberikan kontribusi melalui prestasi dan membawa nama Indonesia di tingkat internasional. RHT



FIFA MATCHDAY

Yordania vs Timnas Indonesia Batal



TIMNAS Indonesia semula direncanakan menghadapi Yordania pada FIFA Matchday November 2026. **FOTO: CNNINDONESIA/ADI IBRAHIM**

SULTENG RAYA - Pertandingan Timnas Indonesia menghadapi Yordania yang sebelumnya direncanakan berlangsung pada 13 November dalam bagian FIFA Matchday November 2026 dipastikan batal.

Pengumuman pembatalan disebarluaskan melalui situs resmi Asosiasi Sepak Bola Yordania (JFA).

"Pertandingan persahabatan internasional yang sedianya mempertemukan Timnas Yordania dengan Timnas Indonesia pada Jumat, 13 November, di ibu kota Amman, resmi dibatalkan," tulis keterangan resmi di situs JFA pada Kamis (5/11).

JFA memberi penjelasan pembatalan lantaran permintaan dari PSSI.

"Pembatalan tersebut dilakukan atas permintaan PSSI yang telah menyampaikan permohonan maaf karena tidak dapat melakoni pertandingan tersebut," ketik JFA.

Sementara pertandingan Timnas Yordania melawan Australia yang berlangsung di Amman pada 17 November tetap berlangsung.

"Federasi Sepak Bola Yordania (JFA) terus berupaya menyediakan kesempatan persiapan dan pematangan terbaik bagi Timnas Yordania. Hal itu dilakukan meski sebagian besar tim nasional negara lain telah memiliki agenda pertandingan persahabatan selama periode jeda internasional yang sama."

"Di sisi lain, Federasi Sepak Bola Yordania menegaskan bahwa pertandingan persahabatan lainnya yang mempertemukan Timnas Yordania dengan Timnas Australia pada Selasa malam, 17 November, di Stadion Internasional Amman, tetap berlangsung sesuai jadwal tanpa perubahan," tulis JFA.

Selain melawan Yordania, skuad Merah Putih rencananya juga akan menjalani laga tandang menghadapi Kuwait dalam FIFA Matchday November 2026. Hingga kini belum ada keterangan pasti soal laga melawan Kuwait. CNN

Persib Cetak Catatan Impresif nan Spesial, Satu-satunya di ACL 2

SULTENG RAYA - Kemenangan atas Melbourne Victory pada matchday keempat AFC Champions League Two (ACL 2) mengantarkan Persib pada catatan spesial.

Gol Luka Menalo dan Balsa Sekulic yang membalikkan keadaan membawa Persib meraih tiga poin di Melbourne, Rabu (4/11).

Persib pun memastikan sebagai klub pertama yang lolos ke babak 16 besar. Selain capaian tersebut, anak asuh Igor Tolic juga punya catatan lain yang tidak bisa disamai klub-klub kontestan lain di ACL 2 2026/2027.

Catatan tersebut adalah kemenangan empat laga awal berturut-turut. Tidak ada klub di Grup A sampai H yang bisa menorehkan hasil serupa Maung Bandung.

Soal tak terkalahkan ada yang menyamai Persib, ada tiga kesebelasan yang juga belum pernah kalah yakni Al Shorta, Al Taawoun, dan Al Jazira.

Hanya saja tiga klub asal Asia Barat itu mengemas tiga kemenangan dan satu hasil seri sehingga mengoleksi 10 poin atau dua poin lebih rendah dibanding Persib.

Satu klub yang punya potensi menyamai poin Persib adalah klub Machida Zelvia asal Jepang yang kini memimpin klasemen Grup G dengan sembilan poin dari tiga pertandingan.

Machida baru akan memainkan laga keempat pada hari ini, Kamis (5/11).

Sementara Persib masih punya kans menyapu bersih dua pertandingan sisa yakni ketika menjamu FC Seoul pada 25 November dan bertandang ke markas The Cong Viettel pada 2 Desember. CNN

IMIP dari halaman 1

pekerja atau 60,06 persen dari total karyawan merupakan generasi Z (Gen Z). Angka itu menempatkan kelompok demografi manusia yang lahir dalam rentang tahun 1997 hingga 2012 tersebut sebagai bagian dominan dalam aktivitas industri di kawasan industri terintegrasi berbasis mineral nikel ini.

Rekap terakhir yang dihimpun HR Departemen PT IMIP pada 24 Oktober 2026, total jumlah karyawan sebanyak 101.846, dengan presentase usia 17-29 tahun (Gen Z) 60,06 persen, generasi milenial (umur 30-45 tahun) 38,05 persen atau berjumlah 38.750 pekerja dan Gen X ke atas (46 tahun +) 1,2 persen atau 1.927 pekerja.

Media Department Head PT IMIP, Dedy Kurniawan, menjelaskan, dominasi Gen Z mencerminkan besarnya keterlibatan kelompok usia muda dalam kegiatan industri, mulai dari operasional produksi hingga berbagai fungsi pendukung. Kondisi ini sekaligus memerlihatkan, sektor industri dapat menjadi salah satu jalur dalam memeroleh pengalaman profesional dan mengembangkan kompetensi sesuai kebutuhan dunia kerja.

"Jika dilihat dari jenjang pendidikan, lulusan SMA/SMK 64,77 persen atau 65.965 pekerja, Diploma 4,68 persen atau 4.766 pekerja, untuk lulusan S1 sebanyak 28,10 persen atau berjumlah 28.623 pekerja. Sementara di jenjang SD, SLTP dan Pascasarjana, ada 2,45 persen atau berjumlah 2.492 pekerja," rinci Dedy Kurniawan, Kamis (5/11/2026).

Ia menegaskan, bagi generasi muda, peluang bekerja di sektor industri tak hanya berkaitan dengan memperoleh penghasilan. Lingkungan kerja juga menjadi ruang untuk membangun disiplin, meningkatkan kemampuan teknis, memahami standar keselamatan dan kesehatan kerja (K3), serta mengembangkan keterampilan bekerja dalam tim.

Diakui, terbukanya peluang tersebut perlu diimbangi dengan kesiapan calon tenaga kerja. Perkembangan teknologi dan proses industri menuntut pekerja memiliki kemampuan beradaptasi, kemauan belajar, serta pemahaman terhadap prosedur kerja. Pendidikan, pelatihan vokasi, dan pengalaman praktik menjadi bekal penting untuk menjembatani kebutuhan industri dengan kompetensi pencari kerja.

Pertumbuhan kebutuhan tenaga kerja juga menghadirkan kesempatan untuk meningkatkan partisipasi dalam kegiatan ekonomi. Karena itu, peningkatan kompetensi pekerja lokal menjadi salah satu aspek penting agar masyarakat setempat dapat mengambil bagian dalam perkembangan industri di Morowali.

IMIP sebagai kawasan industri pengolahan dan hilirisasi mineral menjadi salah satu lingkungan kerja bagi ribuan tenaga kerja dengan latar belakang dan kelompok usia beragam. Besarnya proporsi Gen Z menunjukkan generasi muda telah mengambil peran signifikan dalam aktivitas industri.

"Ke depan, tantangan yang perlu dijawab bukan hanya memperluas kesempatan kerja, tetapi juga memastikan tenaga kerja muda memiliki kompetensi memadai, berada pada lingkungan kerja aman, dan mempunyai kesempatan berkembang secara profesional. Kehadiran IMIP diharapkan dapat menjadi jalan bagi generasi muda untuk meningkatkan kualitas hidup sekaligus berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan penguatan industri nasional," pungkas Dedy. *WAN

API dari halaman 1

jambu mete, kelapa, serta sejumlah lahan kosong. Meski api meluas dan proses pemadaman menghadapi medan yang sulit, tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut.

Kapolsek Moutong, AKP Felix Alfons Saudale, menjelaskan, informasi awal kebakaran diterima dari seorang warga bernama Iyan (25 tahun) bersama istrinya, Ebi. Keduanya kemudian melaporkan kejadian itu kepada Kepala Desa Olonggata, Yusiran Ars, dan Kepala Dusun V, Sabrin.

Merespons laporan tersebut, pemerintah desa segera menghubungi petugas Pemadam Kebakaran Kecamatan Moutong dan Damkar Batalyon TP 918 MM. Masyarakat juga diinformasikan melalui pengeras suara masjid untuk bersama-sama membantu upaya pemadaman.

Sekitar pukul 14.30 Wita, dua unit mobil pemadam kebakaran tiba di lokasi dan langsung melakukan penanganan. Upaya tersebut melibatkan sekitar 50 warga, 10 personel Polri, 19 personel Yon TP 918 MM, serta dua personel Damkar Kecamatan Moutong.

Namun, upaya menjinakkan kobaran api tidak berjalan mudah. Lokasi kebakaran berjarak sekitar 2,5 kilometer dari permukiman warga dan berada di kawasan perkebunan berbukit dengan medan terjal. Tidak adanya akses jalan membuat kendaraan pemadam sulit menjangkau titik kebakaran, sehingga petugas harus menghadapi keterbatasan dalam proses penanganan.

Berdasarkan laporan perkembangan hingga pukul 18.35 Wita, petugas gabungan bersama masyarakat sempat beristirahat setelah melakukan upaya pemadaman. Meski demikian, api masih ditemukan di sejumlah titik sehingga pemantauan dan penanganan lanjutan tetap diperlukan.

Dari hasil analisis awal, kebakaran diduga bermula ketika seorang warga melakukan pembakaran rumput di lahan milik mertuanya. Api kemudian merambat ke perkebunan yang berada di sekitarnya. Banyaknya daun kelapa dan rumput kering diduga mempercepat penyebaran api hingga meluas ke area perkebunan lainnya.

Kapolsek Moutong, AKP Felix Alfons Saudale, mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan pemerintah desa dan unsur terkait untuk melakukan penanganan kebakaran bersama masyarakat.

Ia juga mengingatkan warga agar tidak membuka maupun membersihkan lahan dengan cara membakar. Selain berpotensi menimbulkan kerugian materi, tindakan tersebut dapat memicu kebakaran yang lebih luas dan mengancam keselamatan masyarakat. AJI

POLRES dari halaman 1

periksa penanggung jawab kegiatannya," kata Kapolres Poso AKBP Alowisius Londar saat dihubungi dari Palu, Kamis.

Ia mengatakan kepolisian telah mendatangi tempat kejadian perkara (TKP) pada Selasa (3/11) pagi setelah peristiwa longsor terjadi pada malam hari untuk melakukan olah TKP.

Ia mengungkapkan kepolisian juga mengamankan barang bukti berupa peralatan penggalian manual milik para korban, di antaranya linggis dan beberapa perlengkapan lainnya.

Menurut dia, sebagian peralatan tersebut tertimbun material longsor sehingga hanya sebagian yang ditemukan di lokasi.

Selain itu, terdapat sejumlah material sisa hasil galian yang berada di dalam karung dan diambil oleh masyarakat yang melakukan penggalian di lokasi tersebut.

Kepolisian juga telah meminta keterangan sejumlah saksi yang berada di lokasi kejadian. Keterangan tersebut selanjutnya akan dikembangkan untuk mengungkap pihak yang bertanggung jawab atas aktivitas penambangan tersebut.

Dalam peristiwa tersebut, dua orang meninggal dunia di lokasi kejadian, sedangkan dua orang lainnya mengalami luka-luka dan telah dievakuasi oleh rekan-rekan mereka.

Jenazah kedua korban meninggal dunia telah ditangani dan diserahkan kepada keluarga mereka di Sulawesi Utara.

Kapolres Poso mengatakan aktivitas penambangan tersebut ilegal karena tidak memiliki perizinan.

"Iya, pasti ilegal. Karena ini kan kegiatan yang belum mendapat payung hukumnya, berarti yang tidak ada perizinan ya kita kategorikan itu ilegal," katanya.

Ia menegaskan Polres Poso berkomitmen menindak aktivitas PETI di wilayah tersebut.

Sebelumnya, kata dia, pihaknya telah melakukan penertiban di sejumlah lokasi, antara lain wilayah Bada, Kecamatan Lore Selatan, dan Tambarana di Kecamatan Poso Pesisir Utara.

Penertiban tersebut dilakukan bersama pemerintah daerah, TNI, dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

"Jadi komitmen kita tegas. Kita tidak menginginkan terjadinya ada aktivitas PETI seperti demikian. Dengan kejadian yang terjadi di Dongi-Dongi ini pun kita akan melakukan proses penegakan hukum," katanya. ANT

UKW dari halaman 1

"Saya mengucapkan selamat kepada seluruh wartawan yang dinyatakan kompeten, termasuk dua peserta asal Jambi yang datang jauh-jauh ke Parigi untuk mengikuti UKW ini," ungkap Direktur UKW PWI Pusat, Dr. Aat Surya Syafaat, saat memberikan sambutan pada penutupan kegiatan di Parigi, Rabu, 4 November 2026.

Menurutnya, UKW merupakan salah satu sarana penting bagi wartawan untuk meningkatkan kapasitas dan memperkuat profesionalisme dalam menjalankan tugas jurnalistik.

Ia mengatakan, wartawan harus terus mempersiapkan diri menghadapi berbagai tantangan di dunia jurnalistik. Hal itu, dapat dilakukan dengan meningkatkan kemampuan, memperkuat kapasitas, serta mengasah keterampilan agar mampu bersaing di tengah perkembangan industri media.

"Untuk menjadi wartawan yang profesional, kita harus terus belajar, mengasah keterampilan, dan meningkatkan kompetensi," ujarnya.

Selain kemampuan jurnalistik, Aat juga mengingatkan pentingnya menjaga etika dan sopan santun, baik dalam berperilaku maupun ketika menjalankan tugas peliputan.

Menurutnya, profesionalisme wartawan juga tercermin dari sikap dan cara membawa diri, termasuk memperhatikan penampilan saat bertugas.

"Wartawan adalah orang yang berkelas dan berpendidikan. Jadi, kalau liputan jangan memakai kaus oblong. Jangan memakai sandal juga. Kalau kita ingin dihargai orang lain, kita harus menghargai diri sendiri," ucapnya.

Aat juga mendorong wartawan agar tetap produktif menghasilkan karya jurnalistik. Melalui tulisan, wartawan dapat menyampaikan gagasan, pemikiran, informasi, serta berbagai peristiwa kepada masyarakat.

Tidak hanya kemampuan menulis, ia berharap wartawan juga mengembangkan keterampilan berbicara agar mampu menyampaikan pendapat dan gagasan secara baik.

"Selain menulis, saya juga berharap teman-teman memiliki kemampuan berbicara yang baik agar dapat mengemukakan pendapat dengan baik," pungkasnya.*ENG

TERDUGA dari halaman 1

FA yang merupakan warga Kelurahan Tawanjuka, Kecamatan Tatanga, Kota Palu, ditangkap sekitar pukul 16.00 WITA di Jalan Kerajalemba, Kelurahan Kalukubula, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi.

Penangkapan tersebut merupakan tindak lanjut laporan polisi tertanggal 4 Agustus 2026. Dalam laporan itu, korban bernama Hartono Putra Pratama (30 tahun), seorang wiraswasta asal Kelurahan Kampal, melaporkan kehilangan sepeda motor miliknya dengan kerugian ditaksir mencapai Rp15 juta.

Dari operasi tersebut, petugas turut mengamankan satu unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam silver yang diduga berkaitan dengan perkara pencurian tersebut.

Tanpa perlawanan, FA kemudian dibawa ke Markas Komando (Mako) Polres Parigi Moutong untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Pengungkapan kasus ini menjadi bagian dari upaya kepolisian dalam memberikan kepastian hukum atas laporan masyarakat. Tim Resmob URC Satreskrim Polres Parigi Moutong melakukan serangkaian penyelidikan dan pengembangan informasi hingga akhirnya berhasil melacak keberadaan terduga pelaku di luar wilayah hukum Parigi Moutong.

Kasat Reskrim Polres Parigi Moutong, IPTU Anugerah S. Tarigan, mengatakan pengungkapan tersebut merupakan bentuk keseriusan jajarannya dalam menindaklanjuti setiap laporan masyarakat, khususnya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.

Menurutnya, keberhasilan penangkapan itu tidak terlepas dari kerja sama Tim Resmob URC Satreskrim Polres Parigi Moutong dengan Tim URC Ditreskrimum Polda Sulawesi Tengah.

"Pengungkapan ini merupakan bentuk keseriusan kami dalam menindaklanjuti setiap laporan masyarakat. Kami tidak ingin memberikan ruang bagi pelaku kejahatan yang meresahkan dan merugikan masyarakat. Melalui kerja keras Tim Resmob URC Satreskrim Polres Parigi Moutong bersama Tim URC Ditreskrimum Polda Sulawesi Tengah, terduga pelaku berhasil diamankan di wilayah Kabupaten Sigi berikut satu unit sepeda motor yang diduga merupakan hasil tindak pidana," tegasnya.

IPTU Anugerah Tarigan menambahkan, penyidik masih melakukan pendalaman untuk mengungkap perkara tersebut secara menyeluruh, termasuk menelusuri kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat.

"Kami tidak berhenti pada penangkapan ini. Penyidik masih melakukan pendalaman terhadap keterangan terduga pelaku, menelusuri kemungkinan adanya pelaku lain, serta melengkapi seluruh administrasi penyidikan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Kami juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif memberikan informasi apabila mengetahui adanya aktivitas yang mencurigakan," tambahnya.

Di sisi lain, kepolisian mengingatkan masyarakat agar tidak lengah dalam menjaga keamanan kendaraan pribadi. Sebab, pencurian sepeda motor kerap memanfaatkan kelalaian pemilik, seperti meninggalkan kendaraan tanpa pengawasan, membiarkan kunci kontak masih melekat, hingga memarkir kendaraan di lokasi yang minim pengawasan.

Masyarakat diimbau menggunakan kunci pengaman tambahan, memastikan kendaraan terkunci saat diparkir, tidak meninggalkan kunci kontak pada kendaraan, serta memilih lokasi parkir yang aman dan mudah dipantau. AJI

DPRD Palu Upayakan Bantuan Peralatan Kesehatan Untuk 30 Posyandu



KETUA DPRD Kota Palu Rico A.T. Djanggola saat melakukan penjaringan aspirasi masyarakat atau reses daerah pemilihan (Dapil) I di Jalan Yojokodi, Palu, Rabu (4/11/2026). **FOTO: ANT/ KRISTINA NATALIA**

SULTENG RAYA-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palu, Sulawesi Tengah mengupayakan bantuan peralatan kesehatan bagi 30 posyandu di Kecamatan Mantikulore melalui alokasi anggaran perubahan tahun 2026.

"Saya berharap bulan November sudah terlaksana dan bantuannya diberikan," kata Ketua DPRD Kota Palu Rico A.T. Djanggola di Palu, Kamis (5/11/2026).

Ia menjelaskan bantuan tersebut merupakan hasil koordinasi dengan pihak kecamatan untuk memenuhi kebutuhan fasilitas pelayanan kesehatan masyarakat, khususnya di posyandu.

Adapun bantuan yang akan diberikan berupa tensimeter digital dan timbangan untuk menunjang kegiatan pelayanan kesehatan di posyandu. "Penyerahan bantuan tersebut masih bergantung pada kesiapan pemerintah dalam proses pelaksanaannya," ujarnya.

Ia berharap pemenuhan peralatan kesehatan tersebut dapat melengkapi fasilitas posyandu dalam memberikan pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat.

Selain memperjuangkan bantuan peralatan kesehatan, Rico juga menyerap sejumlah aspirasi masyarakat dalam kegiatan reses caturwulan III masa persidangan 2026 di daerah pemilihan (Dapil) I Kecamatan Palu Timur dan Mantikulore.

Ia mengatakan aspirasi masyarakat yang disampaikan dalam reses tahun 2026 kemungkinan baru dapat direalisasikan pada 2028 karena harus melalui sejumlah tahapan, termasuk proses pendataan dan penginputan sesuai mekanisme penganggaran.

Dalam reses tersebut, sejumlah aspirasi yang disampaikan masyarakat meliputi perbaikan drainase, pelebaran jalan, dan bantuan bibit tanaman secara gratis.

"Semua aspirasi masyarakat kami tampung dan catat untuk ditindaklanjuti sesuai dengan kebutuhan dan anggaran yang ada," ujarnya.ANT

Semarak Tanwir Muhammadiyah di Palu, 257 Anak TK ABA Ikut Lomba Mewarnai

SULTENG RAYA- Suasana Semarak jelang Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Kota Palu semakin meriah dengan digelarnya lomba mewarnai logo Tanwir dan Milad. Kegiatan yang berlangsung penuh keceriaan itu melibatkan ratusan anak dari TK Aisyiyah Bustanul Athfal (ABA) se-Kota Palu.

Ketua Seksi Semarak Milad dan Tanwir, Dr. Muhamad Dasril, M.Si, mengatakan kegiatan tersebut dirancang tidak hanya sebagai hiburan bagi anak-anak, tetapi juga sebagai media edukasi untuk mengenalkan Muhammadiyah sejak usia dini.

Menurutnya, melalui lomba mewarnai, anak-anak dapat belajar mengekspresikan kreativitas sekaligus mengenal simbol dan rangkaian kegiatan Muhammadiyah dengan cara yang sederhana dan menyenangkan.

"Anak-anak kita ajak mengenal Muhammadiyah melalui kegiatan yang mereka sukai. Selain mengembangkan kreativitas, mereka juga mulai mengenal semangat Milad dan Tanwir Muhammadiyah," ujarnya, Kamis (5/11/2026).

Ketua Panitia Penerima Tanwir Muhammadiyah, Prof. Dr. H. Rajindra, SE., MM, mengatakan pelibatan anak-anak TK ABA merupakan bagian dari upaya menghadirkan suasana Tanwir yang dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Ia menilai, Tanwir tidak semata-mata menjadi agenda internal persyarikatan, tetapi juga dapat menjadi momentum memperkenalkan nilai-nilai Muhammadiyah kepada generasi muda melalui kegiatan yang edukatif dan menyenangkan.

"Anak-anak merupakan generasi penerus. Karena itu, mereka perlu diperkenalkan sejak dini dengan nilai kebaikan, kebersamaan, kreativitas, dan semangat bermuhammadiyah. Tanwir dan Milad ini harus menjadi pengalaman yang menyenangkan bagi mereka," katanya. Prof. Rajindra menambahkan, kegiatan mewarnai menjadi salah satu cara mendekatkan rangkaian Tanwir dengan masyarakat. Keterlibatan TK ABA juga memperlihatkan perhatian Muhammadiyah terhadap dunia pendidikan, khususnya pembentukan karakter anak sejak usia dini.

Sementara itu, Ketua Pimpinan Daerah Aisyiyah (PDA) Kota Palu, Nini Martini, M.Pd, yang hadir memantau langsung kegiatan tersebut, mengatakan sebanyak 257 siswa dari 15 TK ABA se-Kota Palu berkumpul dalam semangat persaudaraan, kreativitas, dan kegembiraan.

"Bagi kami, seluruh peserta adalah juara. Mereka telah berani tampil, menunjukkan kemampuan, belajar dengan penuh suka cita, serta menghargai karya teman-temannya," jelasnya.

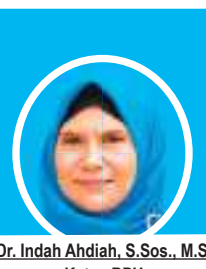
Kata Nini, setiap goresan warna yang dituangkan adalah karya terbaik dari tangan-tangan kecil yang luar biasa. Dari kegiatan sederhana ini, kita menanamkan semangat 'Bersama Satukan Bangsa' sejak usia dini.

"Kepada anak-anak kami berpesan, teruslah bermimpi, teruslah berkreasi, dan teruslah belajar. Jangan takut mencoba dan jangan takut menunjukkan kemampuan. Semoga dari tangan-tangan kecil yang hari ini mewarnai logo Tanwir dan Milad Muhammadiyah, kelak tumbuh generasi Muhammadiyah yang cerdas, berakhlak mulia, berprestasi, serta mampu memberikan manfaat bagi agama, bangsa, dan kemanusiaan," jelasnya.*ENG



PARA peserta didik dari TK Aisyiyah Bustanul Athfal (ABA) se-Kota Palu penuh keceriaan mewarnai logo Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah. **FOTO: FERY**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALU


Dr. Indah Ahdiah, S.Sos., M.Si
Ketua BPH


Prof. Dr. H Rajindra Rum, SE, MM
Rektor


Dr. Sudriman, S.KM M. Kes
Wakil Rektor I


Dr. Burhanuddin SE, M. M
Wakil Rektor II


Dr. Budiman, S.Pd., M.Kes
Warek III


Dr. Moh Yusuf Hasmin, S.H, M.H
Warek IV

Jelang Tanwir Muhammadiyah, PWM Sulteng dan Panitia Tanwir Audiensi dengan Kapolda



KEPALA Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah, Irjen Pol. Rizal Irawan, S.I.K., M.H., menerima rombongan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) di Markas Polda Sulawesi Tengah, Selasa (3/11/2026). **FOTO: HUMAS**

SULTENG RAYA — Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Sulawesi Tengah bersama Panitia Penerima Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah melakukan audiensi dengan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah, Irjen Pol. Rizal Irawan, S.I.K., M.H., di Markas Polda Sulawesi Tengah, Selasa (3/11/2026).

Audiensi yang berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban tersebut menjadi momentum mempererat silaturahmi sekaligus memperkuat koordinasi menjelang pelaksanaan Tanwir Muhammadiyah pada 13 hingga 15 November 2026 di Kota Palu.

Rombongan dipimpin Ketua PWM Sulawesi Tengah, H. Muh. Amin Parakkasi, S.Ag., M.H.I., bersama Rektor Universitas Muhammadiyah Palu sekaligus Ketua Panitia Penerima Tanwir, Prof. Dr. H. Rajindra, S.E., M.M. Turut hadir Sekretaris PWM Sulawesi Tengah, Mulkus Kisman, S.Ag., M.Pd., Sekretaris Panitia Tanwir, Dr. Muh. Rizal Masdul, S.Pd., M.Pd., Sekretaris Universitas Muhammadiyah Palu, Dr. Fadly Umar, S.K.M., M.Kes., unsur PWM Sulawesi Tengah, Prof. Khairil, S.Ag., serta perwakilan Humas PWM Sulawesi Tengah, Imam.

Rektor Universitas Muhammadiyah Palu sekaligus Ketua Panitia Penerima Tanwir, Prof. Dr. H. Rajindra, S.E., M.M., menjelaskan bahwa audiensi tersebut merupakan bagian dari upaya panitia membangun komunikasi dan koordinasi dengan berbagai pihak guna mendukung kelancaran penyelenggaraan agenda nasional Muhammadiyah.

"Tanwir Muhammadiyah merupakan agenda penting persyarikatan yang akan mempertemukan pimpinan Muhammadiyah dari berbagai wilayah di Indonesia. Sebagai tuan rumah, kami memiliki tanggung jawab untuk mempersiapkan penyelenggaraannya sebaik mungkin, termasuk membangun koordinasi dengan jajaran Polda Sulawesi Tengah," ujar Prof. Rajindra.

Menurutnya, dukungan dan sinergi berbagai pihak menjadi bagian penting dalam menciptakan suasana yang aman, tertib, dan kondusif selama berlangsungnya kegiatan.

"Kami berharap melalui silaturahmi ini, komunikasi dan koordinasi antara panitia dan Polda Sulawesi Tengah semakin baik, sehingga seluruh rangkaian kegiatan Tanwir dapat berjalan dengan lancar dan memberikan kenyamanan bagi seluruh peserta yang hadir," ungkapnya. Prof. Rajindra menambahkan bahwa kepercayaan kepada Sulawesi Tengah sebagai tuan rumah Tanwir menjadi kebanggaan sekaligus tanggung jawab bersama.

Ia berharap momentum tersebut dapat memperkenalkan Sulawesi Tengah sebagai daerah yang memiliki semangat kebersamaan, keramahan, serta kemampuan dalam menyelenggarakan kegiatan berskala nasional.

"Kita ingin seluruh peserta Tanwir yang datang dari berbagai daerah mendapatkan kesan yang baik selama berada di Kota Palu. Karena itu, kebersamaan dan dukungan semua pihak sangat berarti bagi kesuksesan kegiatan ini," tambahnya.

Pertemuan dengan Kapolda Sulawesi Tengah, Irjen Pol. Rizal Irawan, juga menjadi bagian dari penguatan hubungan kelembagaan antara Muhammadiyah dan kepolisian dalam membangun kehidupan masyarakat yang aman, harmonis, dan kondusif. Melalui audiensi ini, PWM Sulawesi Tengah dan Panitia Penerima Tanwir berharap terbangun koordinasi yang semakin erat dengan jajaran Polda Sulawesi Tengah, khususnya dalam mendukung kelancaran pelaksanaan Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah.

Tanwir Muhammadiyah dijadwalkan berlangsung pada 13 hingga 15 November 2026 di Kota Palu, dengan menghadirkan unsur pimpinan Muhammadiyah dari berbagai wilayah di Indonesia. Kegiatan tersebut diharapkan menjadi momentum memperkuat silaturahmi, konsolidasi persyarikatan, dan kontribusi Muhammadiyah bagi kemajuan umat, bangsa, dan negara.*ENG

